

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI (RPIP)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017-2037**

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI (RPIP)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017-2037**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) disusun sebagai pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Oleh karena itu RPIP Kalimantan Barat Tahun 2017-2037 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”. Di dalam RIPIN, Provinsi Kalimantan Barat memiliki satu Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang meliputi kabupaten/kota Pontianak – Mempawah - Landak – Sanggau – Ketapang – Sambas - Bengkayang.

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat Pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08' LU serta 3°02' LS serta di antara 108°30' BT dan 114°10' BT pada peta bumi.

Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°), tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka



Gambar 1.1 Peta Kalimantan Barat

Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

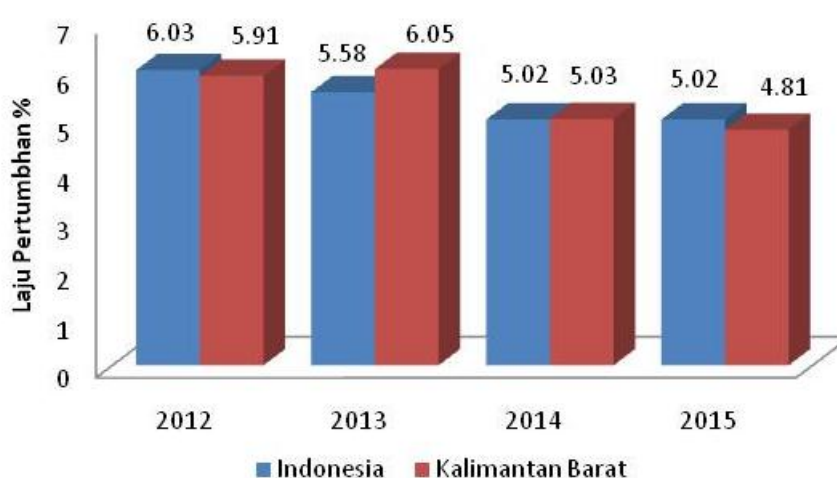
Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah 146.807 km² memiliki 12 kabupaten dan 2 kota, 5 kabupaten di antaranya berada

di wilayah sebelah utara provinsi ini yang langsung berbatasan dengan negara Malaysia, yaitu: Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang hingga Kapuas Hulu. Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan rendah. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur. Dengan luas wilayahnya ini, maka Kalimantan Barat termasuk provinsi terluas keempat di Indonesia. Adapun batas-batas wilayah Kalimantan Barat yaitu :

- a. Utara, berbatasan dengan Sarawak (Malaysia);
- b. Selatan, berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Timur, berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur; dan
- d. Barat, Laut Natuna dan Selat Karimata.

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2015 berjumlah sekitar 5,323 juta jiwa (2,741 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,582 juta jiwa adalah perempuan). Dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat 146.807 Km², maka kepadatan penduduk (*density*) Kalimantan Barat baru sekitar 31,62 Jiwa per kilometer persegi.

Kondisi kinerja pembangunan terkait dengan perkembangan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu tahun 2012-2015 relatif berfluktuasi namun secara umum menunjukkan perkembangan yang meningkat.



Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2012 - 2015

Pada level internal Provinsi, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan Barat tidak merata dan bervariasi, yaitu dalam kisaran 5-6 persen. Untuk tahun 2015, dari 14 kabupaten/ kota yang ada di Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh

Kabupaten Kubu Raya yaitu sebesar 6,44 persen, kemudian diikuti Kota Singkawang sebesar 6,43 persen. Selain Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang, beberapa daerah juga mencapai tingkat akumulasi pertumbuhan yang cukup tinggi, seperti Kabupaten Sekadau, Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak.

Kalimantan Barat memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor pertanian, pertambangan dan juga perikanan, diantaranya yang menonjol adalah sawit, karet, kelapa dalam, kakao, lada, jeruk, aloevera, perikanan tangkap, bauksit dan lain-lain. Sesuai dengan potensi sumberdaya alam Provinsi Kalimantan Barat, industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri pengolahan sawit, industri pengolahan karet, serta industri pengolahan kelapa, dan industri pengolahan bauksit yang merupakan komoditi utama daerah.

Pengembangan industri komoditas utama dan komoditas unggulan lainnya di Kalimantan Barat tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Berbagai kendala menjadi permasalahan utama pembangunan industri di Kalimantan Barat. Permasalahan utama ini antara lain:

- a. pengembangan sektor hulu belum optimal bersinergi dengan pengembangan sektor industri;
- b. sumberdaya manusia (sektor hulu dan sektor industri) masih kurang dan harus ditingkatkan, juga pengorganisasian yang belum sepenuhnya mampu mengeksplorasi sumberdaya;
- c. pengembangan produk bernilai tambah masih sangat terbatas dan terpaku pada beberapa jenis produk antara (produk setengah jadi tertentu), belum berkembang sesuai dengan potensinya dan belum sampai pada kompetensi spesifik daerah;
- d. infrastruktur yang belum memadai dalam mendukung pengembangan industri lebih lanjut; dan
- e. pembangunan kawasan industri yang direncanakan belum sepenuhnya terealisasi.
- f. Pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah akan terealisasi.

Dengan berbagai permasalahan di atas, maka penting adanya perencanaan pembangunan industri Provinsi Kalimantan Barat yang mampu menguraikan dan memberi solusi serta memecahkan berbagai permasalahan di atas dan memberi dampak pada pembangunan sektor

industri di Kalimantan Barat yang lebih maju. Namun, pendekatan perencanaan dan implementasi yang parsial, hanya akan berdampak parsial juga, bahkan dalam jangka waktu tertentu kemudian hilang, dan tidak lagi berdampak pada pembangunan industri. Demikian juga pendekatan perencanaan dan implementasi yang seremonial, tidak memberikan pengaruh kontinuitas yang justru sangat diperlukan dalam pengembangan dunia industri. Demikian juga dengan pendekatan sektoral semata, akan memutus rangkaian suplai yang berdampak pada tidak sinerginya rantai pasok dan berakibat hingga hancurnya industri. Maka pendekatan perencanaan yang harus dilakukan dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri adalah pendekatan perencanaan yang komprehensif.

Komprehensif berarti memperhatikan rantai pasok dan distribusi, dan memperhatikan dalam setiap tahapannya kebutuhan industri yang harus dipenuhi, kemudian menyusun program-program/rencana aksi yang relevan untuk itu. Komprehensif ini juga bermakna terbangunnya keterkaitan yang kuat antar sektor yang terkait.

Di sisi lain, dengan memperhitungkan keterbatasan kapasitas Pemerintah khususnya dalam pendanaan untuk mencakup seluruh komoditas dan jenis industrinya, maka perencanaan pembangunan industri ini harus fokus pada komoditas dan jenis industri terpilih, sehingga kapasitas yang ada dapat diarahkan secara lebih padu pada komoditas dan jenis industri ini. Namun menjadi sangat penting untuk memilih komoditas dan jenis industrinya yang menjadi fokus dalam perencanaan ini, karena harus dipilih komoditas dan jenis industri yang berdampak paling besar dalam perekonomian wilayah dan yang dapat menjadi trigger bagi komoditas dan jenis industri lainnya.

Fokus dalam hal ini berarti harus dipilih komoditas dan jenis industrinya yang betul-betul berdampak paling besar dalam perekonomian wilayah dan yang dapat menjadi pemicu/pendorong bagi komoditas dan jenis industri lainnya.

Memperhatikan pentingnya adanya perencanaan pembangunan industri di Kalimantan Barat dan dengan paling tidak merujuk pada dua pendekatan di atas, maka dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Barat ini. Disamping secara fakta diperlukan adanya perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan fokus, penyusunan perencanaan pembangunan industri ini juga

merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014, termaktub tujuan pembangunan industri secara nasional yaitu dalam rangka mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perwujudannya dilakukan melalui pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, dan tindakan pengamanan dan penyelamatan industri.

Bagi daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pembangunan industri akan memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan didaerah. Proses industrialisasi dan pembangunan industri merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Industrialisasi juga tidak lepas dari usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hal ini berarti sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai usaha untuk memperluas ruang lingkup kegiatan masyarakat.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa melalui pembangunan industri akan membawa dampak “vertikal” yakni semakin besarnya nilai tambah pada kegiatan ekonomi, dan sekaligus secara “horizontal” yakni semakin luasnya lapangan kerja produktif bagi masyarakat.

Industri telah diakui mempunyai peranan sebagai *leading sector* pembangunan ekonomi. Karena dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan menangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian, sektor jasa maupun perdagangan.

Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri, begitu pula dengan sektor jasa yang akan turut mengikuti perkembangan sektor industri seperti berkembangnya lembaga-lembaga keuangan, pemasaran, pendidikan dan jasa lainnya.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang mendorong pertumbuhan industri diluar pulau jawa saat ini merupakan peluang emas untuk dimanfaatkan. karena dengan adanya pusat pertumbuhan industri yang baru di luar

pulau Jawa akan juga mendorong pertumbuhan di daerah yang terdekat dengan pusat pertumbuhan industri tersebut.

Maka dari itu Provinsi Kalimantan Barat berupaya mendorong munculnya pusat pertumbuhan industri yang baru di Kabupaten/Kota yang tidak saja akan meningkatkan perekonomian di daerah pusat pertumbuhan industri, namun juga menarik daerah lainnya sebagai penyokong pusat pertumbuhan industri tersebut.

Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah, karena dalam menumbuhkan industri-industri yang baru diperlukan sinergitas berbagai sektor antara lain yakni kebutuhan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan industri, jaminan ketersediaan bahan baku, ketersediaan energi maupun ketersediaan jaringan infrastruktur yang memadai guna menunjang aktifitas industri di daerah.

RPIP merupakan prioritas dari Gubernur di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi terkait, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD. Rancangan RPIP disusun oleh Gubernur, sedangkan rancangan Renstra-SKPD disusun oleh pimpinan masing-masing SKPD Provinsi. Rancangan RPIP ditelaah oleh Menteri Dalam Negeri agar konsisten dengan RPJMD provinsi dan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk menelaah konsistensi RPIP dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPIP Kalimantan Barat yaitu:

1. Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 10 ayat (1) setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi, atau Pasal 11 ayat (1) setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; dan
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (1).

C. Sistematika Penulisan

Sistematika RPIP Kalimantan Barat Tahun 2017-2037 mengacu/berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya rencana pembangunan industri Provinsi/Kabupaten/Kota

B. Dasar Hukum

C. Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (minimum tiga tahun terakhir)

B. Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.

C. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan tentang pengembangan IKM, unit pelayanan teknis (UPT), jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah

B. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota

C. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota

Meliputi Pertumbuhan sektor industri, Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, Nilai ekspor produk industri, Jumlah tenaga kerja di sektor industri, Nilai Investasi sektor industri

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA

A. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi/Kabupaten/Kota

Penentuan industri unggulan provinsi/kabupaten/ kota berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Provinsi/ Kabupaten/Kota

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pogram-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri

5. Pemberdayaan Industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

V. PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota selama 20 tahun ke depan.

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 kabupaten/kota yaitu 12 kabupaten dan 2 kota. Dari 14 kabupaten/kota ini terbagi dalam 174 kecamatan, 99 kelurahan dan 1.977 desa.

Menurut kelompok umur, penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 masih membentuk piramida dengan kelompok umur usia anak dan usia produktif relatif besar, sedangkan berdasarkan lapangan usaha, penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebanyak 2.235.887 orang pada tahun 2015 masih didominasi penduduk yang bekerja di sektor Pertanian yang menyerap lebih dari 57% (1.279.098 orang) dari total angkatan kerja yang bekerja.

Tabel 2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015

No	Kab/Kota	Penduduk		Jumlah Penduduk	Tumbuh * (%)	Kepadatan (Jiwa/km ²)
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Sambas	322.295	305.542	627.837	0,13	80.62
2	Bengkayang	145.976	135.208	281.184	0,29	42.39
3	Landak	205.574	187.321	392.895	0,22	35.07
4	Mempawah	153.129	145.849	298.978	0,20	192.59
5	Sanggau	247.894	230.836	478.730	0,20	33.53
6	Ketapang	298.358	276.287	574.645	0,15	14.59
7	Sintang	207.102	192.730	399.832	0,32	17.78
8	Kapuas Hulu	121.095	113.895	234.990	0,34	7.91
9	Sekadau	106.794	99.709	206.503	0,31	34.91
10	Melawi	117.562	109.180	226.742	0,20	17.76
11	Kayong Utara	62.291	58.637	120.928	0,40	22.22
12	Kubu Raya	306.949	290.553	597.502	0,14	75.78
13	Kota Pontianak	328.619	323.706	652.325	0,11	5,446.84
14	Kota Singkawang	118.056	112.838	230.894	0,22	394.33
KALIMANTAN BARAT		2.741.694	2.582.291	5.323.985	3,24	31.62

Sumber : Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setda Prov. Kalbar Tahun 2016

Secara sektoral, seluruh sektor ekonomi di Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi tahun 2015 dialami oleh sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 15,56%, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 12,03%, dan sektor Konstruksi sebesar 10,24%.

Sektor-sektor yang memiliki peranan besar sebagai penggerak utama (*primemover*) perekonomian Provinsi Kalimantan Barat masih didominasi

oleh empat sektor utama yaitu (1) sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2) sektor Industri Pengolahan, (3) sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (4) sektor Konstruksi Kontribusi masing-masing 23,30%, 16,86%, 15,11% dan 10,92%.

Tabel 2.2. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (persen) di Kalimantan Barat Tahun 2014-2015

No.	Sektor	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23.30	22.90
2	Pertambangan & Penggalian	4.29	4.12
3	Industri Pengolahan Non Migas	16.85	16.63
4	Pengadaan Listrik, Gas	0.08	0.08
5	Pengadaan Air	0.14	0.14
6	Konstruksi	10.95	11.21
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda	15.08	15.29
8	Transportasi dan Pergudangan	4.20	4.23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.29	2.31
10	Informasi dan Komunikasi	4.12	4.37
11	Jasa Keuangan	3.60	3.62
12	Real Estate	3.02	2.99
13	Jasa Perusahaan	0.48	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4.72	4.83
15	Jasa Pendidikan	4.35	4.28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.46	1.44
17	Jasa Lainnya	1.08	1.07

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh tersedianya infrastruktur antara lain jalan, pelabuhan, airport, air, listrik sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3.

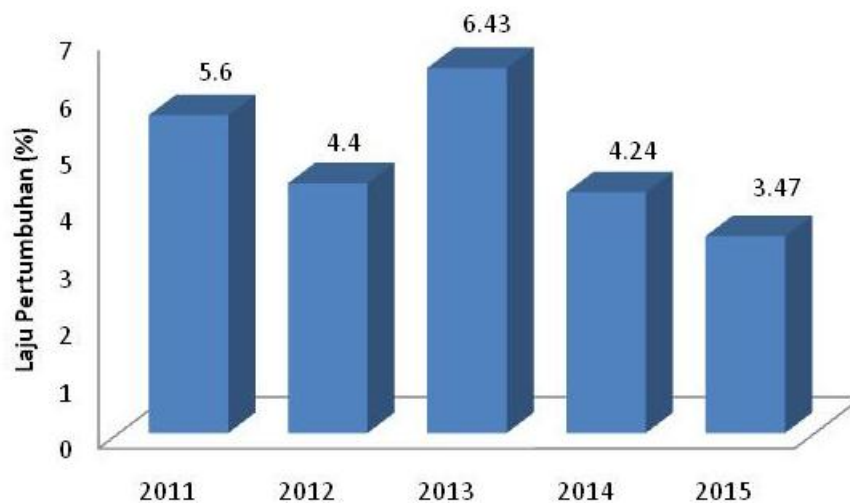
Tabel 2.3 Infrastruktur Pendukung

No.	Infrastruktur	2015
1	Panjang jalan:	
	a. Nasional (km)	1.665
	b. Provinsi (km)	1.562,30
	c. Kabupaten/Kota (km)	10.613,06
2	Jumlah pelabuhan (pelabuhan)	10
3	Jumlah bandara (bandara)	6
4	Penggunaan Air (m ³)	46.446.204
5	Pemakaian Listrik (MW)	321,072

Sumber : Bappeda Prov. Kalbar (diolah)

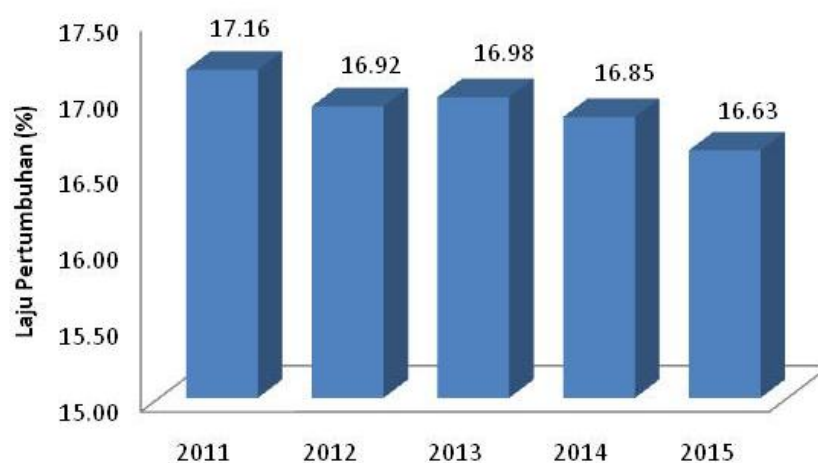
Secara umum dalam periode 2011-2015 sektor industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2013 yaitu sekitar 6,4 %.

Gambar 2.1. Grafik Perkembangan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2011-2015



Sektor industri pengolahan non migas memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011-2015 secara berturut-turut sebesar 17,16%, 16,92%, 16,98%, dan 16.85%. Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami sedikit penurunan karena dipengaruhi oleh penurunan industri kayu dan hasil hutan lainnya serta masih lambatnya pertumbuhan subsektor industri lainnya dibanding pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

Gambar 2.2. Grafik Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2011-2015



Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 didominasi oleh subsektor industri Makanan dan Minuman yang mencapai nilai 75,26 %, selain itu juga terdapat dua subsektor lainnya yaitu

(1) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, dan (2) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, dengan kontribusi masing-masing sebesar 6,33% dan 6,04%.

Walaupun industri berbasis kayu masih merupakan industri utama kedua namun tidaklah menjadi komoditi industri unggulan masa mendatang di Kalimantan Barat. Hal ini dengan mempertimbangkan diantaranya industri per kayu akan bersentuhan secara langsung dengan isu-isu lingkungan (*illegal logging*), dan kelestarian hutan Kalimantan yang disebut sebagai paru-paru dunia. selain itu juga industri per kayu saat ini hanya berupa industri primer dan dalam dalam kajian yang telah dilakukan struktur industri yang dapat dibangun tidak dapat dikembangkan sedalam industri-industri lainnya.

Tabel 2.1. Kontribusi Masing-Masing Cabang Industri dalam Pembentukan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas Tahun 2015

No.	Kelompok Industri	Nilai Tambah (Juta Rupiah)	Distribusi (%)
1	Industri Makanan dan Minuman	14.053.629,1	75,26
2	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu	1.127.672,8	6,04
3	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1.182.362,9	6,33
4	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik Optik dan Peralatan Listrik	815.083,8	4,37
5	Industri Furnitur	401.195,5	2,15
6	Industri Logam Dasar	332.380,3	1,78
7	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi	301.995,1	1,62
8	Industri Alat Angkutan	148.787,3	0,80
9	Industri Barang Galian bukan Logam	121.774,0	0,65
10	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	80.398,0	0,43
11.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Produksi Media Rekaman	59.896,8	0,32
12.	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	32.314,4	0,17
13.	Industri Kimia, farmasi dan Obat Tradisional	7.583,8	0,04
14.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	7.129,7	0,04
	Industri Pengolahan Non Migas	18.672.203,50	100,00

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

Jumlah unit usaha industri besar sedang (IBS) di Provinsi Kalimantan Barat didominasi oleh industri Makanan dan Minuman,

disusul dengan industri Karet dan barang dari karet dan industri Perakayuan berturut-turut masing-masing sekitar 56,45%, 14,52% dan 7,26 % dari jumlah unit usaha IBS.

Tabel 2.2. Jumlah Unit Usaha IBS Masing-Masing Cabang Industri Tahun 2014-2015

KBLI	Kelompok Industri	2014		2015	
		Unit usaha	Distribusi (%)	Unit usaha	Distribusi (%)
10-11	(Makanan, Minuman, Tembakau)	70	56,45	101	61,21
16	(Kayu dan barang-barang dari kayu(tidak termasuk furniture) dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya)	9	7,26	19	11,51
17-19	(Kertas dan barang cetakan)	7	5,65	7	4,24
20	(Kimia dan barang dari kimia)	8	6,45	9	5,45
22	(Karet dan barang-barang dari karet)	18	14,52	17	10,30
23	(Barang galian bukan logam)	5	4,03	5	3,03
25	(Barang logam, kecuali mesin dan peralatannya)	3	2,42	3	1,81
31	(Furnitur)	4	3,23	4	2,42
Total		124	100	165	100

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Ekspor dari Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 lebih banyak didominasi oleh ekspor yang berasal dari produk-produk industri setengah jadi komoditas karet, dan produksi hasil tambang dengan nilai lebih dari 1.345 Juta US\$ atau lebih dari 80 persen dari total ekspor. Namun ekspor Kalimantan Barat menurun drastis pada tahun 2014 menjadi setengahnya yaitu sebesar US\$ 0,65 milyar, akibat larangan ekspor bauksit secara langsung yang mengacu pada UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba dan Permen ESDM No.1 tahun 2014.

Larangan pemerintah terhadap ekspor langsung bauksit termasuk dalam bentuk *washed bauxite* atau *metallurgical grade bauxite* (MGB) yang efektif dijalankan sejak awal 2014 menyebabkan secara otomatis berhentinya seluruh kegiatan ekspor bauksit dari Kalimantan Barat, karena industri alumina maupun aluminium ingot belum operasional di

Kalimantan Barat. Disisi lain, larangan ini telah memacu tumbuhnya industri alumina di Kalimantan Barat.

Tabel 2.3. Jumlah Ekspor Non Migas Tahun 2014 dan 2015

No	Kelompok Komoditi	2014		2015	
		Nilai (US \$)	Distribusi (%)	Nilai (US \$)	Distribusi (%)
1	Karet dan barang dari karet	366.231.837	56,17	274.835.965	51,97
2	Bijih, kerak dan abu logam	18.880.277	2,90	1.400.025	0,26
3	Kayu, barang dari kayu	165.281.302	25,35	153.533.370	29,03
4	Lemak dan minyak hewan/ nabati	42.033.329	6,45	52.882.102	10
5	Ampas/ sisa industri makanan	15.746.932	2,42	10.919.733	2,06
6	Ikan dan udang	6.677.585	1,02	5.726.657	1,08
7	Biji-bijian berminyak	3.884.228	0,60	3.067.125	0,58
8	Buah-buahan	4.315.646	0,66	7.087.118	1,34
9	Perhiasan/ permata	3.822.000	0,59	-	-
10	Kapal laut dan bangunan terapung	9.988.127	1,53	19.421.087	3,67
	Lainnya	15.125.017	2,32	-	-
Jumlah		651.986.280	100,00	528.873.182	100,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Kalbar 2015

Salah satu produksi terbesar Kalimantan Barat adalah CPO, namun secara umum ekspornya masih belum dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Barat sehingga tidak tercatat dalam nilai ekspor ini.

B. Sumber Daya Industri

Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku, lembaga diklat dan litbang serta investasi industri. Perkembangan sumber daya industri tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4. Perkembangan Sumber Daya Industri Tahun 2015

No.	Sumber Daya Industri	2015
1	Tenaga kerja sektor industri	81.591 orang
2	Pemanfaatan sumber daya alam utama terbarukan sebagai bahan baku :	
	a. karet	261.578 ton
	b. sawit	1.057.873 ton
	c. kelapa	73.483 ton
	d. Hasil Laut dan Perikanan	65.267 ton
	e. Kayu	747.959,71 M3
	f. Tanaman Pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar)	1.567.760 ton
2	Pemanfaatan sumber daya alam tidak terbarukan sebagai bahan baku :	
	a. bauksit (total potensi)	4,37 milyar ton
3	Lembaga Pendidikan	
	a. Pendidikan Tinggi	
	- Jumlah	45 unit
	- Kapasitas	69.360 orang
	b. Sekolah Menengah Kejuruan	
	- Jumlah	192 unit
	- Kapasitas	51.543 orang
4	Jumlah lembaga Pelatihan	272 unit
5	Jumlah lembaga LITBANG	1 unit
6	Jumlah investasi industri (Rp.Milyar) akumulatif hingga 2014	2.366,63 milyar rupiah

C. Sarana dan Prasarana

Pembangunan sektor industri didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur/pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan untuk industri, dan infrastruktur penunjang (lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan). Perkembangan sarana dan prasarana industri di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5. Perkembangan Sarana dan Prasarana Tahun 2015

No.	Sarana dan Prasarana	2015
1	Jumlah Infrastruktur pengelolaan lingkungan	
	a. Limbah padat	1 unit
	b. Limbah cair	-
	c. Limbah udara	-
2	Jumlah kawasan industri sedang proses pengembangan	5 kawasan industri
3	Jumlah lahan untuk industri	8.853 ha
4	Infrastruktur Penunjang	
	a. lembaga uji	2 unit
	b. kawasan berikat	1 unit
	c. kawasan pergudangan	5 kawasan

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pemberdayaan IKM dilakukan melakukan melalui penguatan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Perkembangan pemberdayaan IKM di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Hasil Survei Badan Pusat Statistik, jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tahun 2015 di Kalimantan Barat sebanyak 37.412 unit usaha yang mampu menyerap 76.308 orang tenaga kerja .

Tabel 2.6. Perkembangan Pemberdayaan IKM Tahun 2015

No.	Kelembagaan	2015
1	Jumlah Unit Usaha IKM	37.412
2	UPT (unit)	1
3	TPL (orang)	12
4	Konsultan/shindansi (orang)	5
5	Pusat promosi (unit)	1

III. VISI DAN MISI, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka Visi Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat adalah: **“Terwujudnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan yang Maju dan Berdaya Saing serta Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Kalimantan Barat”**.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, pembangunan industri Provinsi Kalimantan Barat mengemban Misi sebagai berikut:

1. Menumbuh-kembangkan industri untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing;
2. Menumbuhkan industri-industri hilir lanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah; dan
3. Meningkatkan kemandirian daerah, terjaganya lingkungan, dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi sektor industri di Kalimantan Barat.

B. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah;
2. Meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri hingga meningkatkan volume, varian dan nilai ekspor produk-produk industri yang berdaya saing;
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah kedalam sektor industri;
4. Meningkatkan arus investasi ke daerah melalui sektor industri; dan
5. Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif yang mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuhnya industri-industri baru.

C. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi

Sasaran pembangunan industri Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037

No.	Sasaran	Satuan	Tahun			
			2022	2027	2032	2037
1	Pertumbuhan sektor industri nonmigas	%	8,5	9,3	10	11,5
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB	%	25	28	32	35
3	Nilai ekspor produk industri nonmigas	juta US \$	3.260,5	4.467,2	6.120,5	8.385,6
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	orang	100.000	115.000	125.000	150.000
5	Nilai Investasi nonmigas akumulatif					
	a. Penanaman Modal Asing	milyar US \$	0,81	1,92	4,23	8,34
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri	Rp. triliun	62,88	119,15	178,33	219,06

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

A. Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Provinsi Kalimantan Barat dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; pemberdayaan IKM. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumberdaya unggulan yang meliputi karet, sawit, kelapa, bauksit, Kayu, hasil laut dan perikanan dan tanaman pangan dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
3. Mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan;

4. Meningkatkan dukungan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha;
5. Memperbaiki iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung-jawab;
6. Meningkatkan kerjasama antar institusi terkait (pusat-daerah, lembaga penelitian, dan sebagainya);
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi dan sistem logistik yang efisien dengan dukungan Ketersediaan sarana pelabuhan, transportasi air, kereta api dan jalan darat yang memenuhi standar Industri serta fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri;
8. Mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri;
9. Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
10. Membangun Kawasan Industri sesuai perencanaan; dan
11. Membangun Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

B. Program Pembangunan Industri

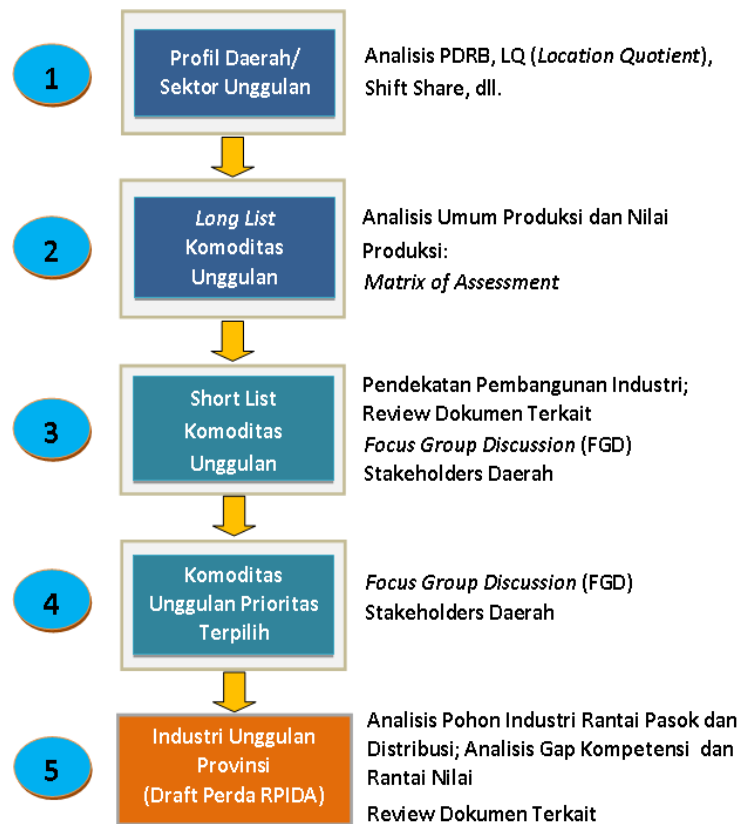
Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi

a. Penetapan Industri Unggulan Provinsi

Penetapan industri unggulan Provinsi Kalimantan Barat dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan *long list* komoditas unggulan dari sektor/ sub-sektor unggulan dan sektor/ sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan *short list* komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIP ini dan tahap kelima penentuan industri unggulan provinsi.

Secara umum tahapan penetapan industri unggulan provinsi tersebut digambarkan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4.1 Tahapan Umum Proses Penentuan Industri Unggulan Provinsi

Selain analisis diatas, dalam rangkaian penetapan industri unggulan provinsi juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria dan sub-kriteria/faktor yang dimunculkan melalui sebagian pendekatan dari metode *Pairwise* yang sudah umum digunakan dalam analisis pengembangan industri. Melalui analisis yang dilakukan, dapat diambil 3 kriteria pokok dan darinya ditetapkan 10 sub-kriteria (faktor).

Tiga kriteria pokok ini yaitu:

- 1) Kriteria Keunggulan; mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
- 2) Kriteria Manfaat; mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.
- 3) Kriteria Penerimaan Stakeholders; mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha

Adapun 10 sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

- 1) nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah

- 2) nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan
- 3) ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam
- 4) aspek pemasaran/akses dan volume pasar
- 5) dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah
- 6) dukungan sumber daya manusia
- 7) kekhasan daerah
- 8) kesiapan dan kesediaan masyarakat
- 9) kesiapan dan kesediaan pemerintah
- 10) kesiapan dan kesediaan pelaku usaha

Berdasarkan analisis-*analisis* yang dilakukan dalam setiap tahapan tersebut, maka ditentukan 7 (tujuh) Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

- 1) Industri Pengolahan Karet
- 2) Industri Pengolahan Sawit
- 3) Industri Pengolahan Kelapa
- 4) Industri Pengolahan Bauksit
- 5) Industri Pengolahan Hasil laut dan Perikanan
- 6) Industri Pengolahan Kayu
- 7) Industri Pengolahan Tanaman Pangan

Adapun jenis industri unggulan Provinsi Kalimantan Barat tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Jenis Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Barat

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
1.	Industri Pengolahan Karet	1. Industri <i>compound/ crumb rubber</i> 2. Industri pembuatan Lateks Pekat 3. Industri Lateks Pekat menjadi barang-barang keperluan rumah tangga 4. Industri barang dari karet lainnya 5. Industri kayu karet (<i>board/ furniture</i>).	1. Industri <i>compound/ crumb rubber</i> 2. Industri pembuatan Lateks Pekat 3. Industri Lateks Pekat menjadi barang-barang keperluan rumah tangga 4. Industri barang dari karet lainnya 5. Industri kayu karet (<i>board/ furniture</i>). 6. Industri pengolahan kompond menjadi barang keperluan rumah tangga 7. Industri pengolahan kompond menjadi komponen otomotif	1. Industri <i>compound/ crumb rubber</i> 2. Industri pembuatan Lateks Pekat 3. Industri Lateks Pekat menjadi barang-barang keperluan rumah tangga 4. Industri barang dari karet lainnya 5. Industri kayu karet (<i>board/ furniture</i>). 6. Industri pengolahan kompond menjadi barang keperluan rumah tangga 7. Industri pengolahan kompond menjadi komponen otomotif

			8. Industri Lateks Pekat menjadi alat-alat kesehatan	8. Industri Lateks Pekat menjadi alat-alat kesehatan 9. Industri Ban (Pabrik Ban)
2.	Industri Pengolahan Sawit	<i>INDUSTRI OLEOFOOD</i>		
		Minyak Nabati Kasar (CPO, PKO, CNO), Olein, Stearing, Gliserol, Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), Margarin, Shortening	Specialty fats (coco butter substitute, shortening, margarin), Tocopherol, Betacarotene, asam organik, dan alkohol dari limbah industri sawit, arang aktif, serat nabati	Specialty fats aditif/penolong pengolahan pangan
		<i>INDUSTRI OLEOKIMIA</i>		
		Fatty acids, Fatty alcohols, Methyl ester sulfonat (biosurfactant), Biolubricant (rolling oils), Gliserin base chemicals	Fatty acids, Fatty alcohols, Fatty amine, Methyl esters, Bioplastics (PHB, PHV, polylactate) berbasis limbah PKS, arang aktif, dan serat nabati	Fatty acids, Fatty alcohols, Fatty amine, Methyls esters, dan polymers turunan minyak sawit
		<i>INDUSTRI KEMURGI</i>		
	Biodisel (fatty acid, Methyl Ester/FAME), Bioavtur (bio jet fuel)	Biodisel, bioethanol, bioavtur (bio jet fuel) Bio gas dari POME, Biomaterial untuk peralatan medis, aromatic building blocks berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi, Bioetanol berbahan baku lignoselulosa dan limbah biomasa	Biodisel, bioethanol, bioavtur (bio jet fuel) Nano-cellulose derivatives, bio-based fiber& polymers(carbon fiber, vicous), new generation of biobasedcomposit, Secondary biofuel(bioetanol, Bioetanol(berbahan baku lignoselulosa), secondary biofuel(biomass pyrolysis-gasification	
3.	Industri Pengolahan Kelapa	1. Industri Minyak Goreng Kelapa; 2. Industri VCO; 3. Tepung Kelapa Kering; 4. Santan Dalam Kemasan; 5. Natadecoco 6. Industri arang/ karbon aktif; 7. Industri sabut kelapa (Sabut kelapa berkaret/ Sabutret untuk Jok mobil/ kursi; kasur; bantal, dll.	1. Industri Minyak Goreng Kelapa; 2. Industri VCO; 3. Tepung Kelapa Kering; 4. Santan Dalam Kemasan; 5. Natadecoco 6. Industri arang/ karbon aktif; 7. Industri sabut kelapa (Sabut kelapa berkaret/ Sabutret untuk Jok mobil/ kursi; kasur; bantal, dll.	1.Industri Minyak Goreng Kelapa; 2.Industri VCO; 3.Tepung Kelapa Kering; 4.Santan Dalam Kemasan; 5.Natadecoco 6.Industri arang/ karbon aktif; 7.Industri sabut kelapa (Sabut kelapa berkaret/ Sabutret untuk Jok mobil/ kursi; kasur; bantal, dll.
4.	Industri Bauksit	1. Alumina Produk ini merupakan Al ₂ O ₃ dengan proses pengolahan dan perlakuan tertentu (terdapat lebih dari 80 jenis spesifikasi produk alumina/ DIproduksi oleh PT. ICA) 2. Produk Hydrate, Produk ini merupakan Al ₂ O ₃ .3H ₂ O dengan proses pengolahan	1. Alumina Produk ini merupakan Al ₂ O ₃ dengan proses pengolahan dan perlakuan tertentu (terdapat lebih dari 80 jenis spesifikasi produk alumina/ DIproduksi oleh PT. ICA) 2. Produk Hydrate, Produk ini merupakan Al ₂ O ₃ .3H ₂ O dengan	1. Smelter/Alumina 2. Aluminium Scrap 3. Aluminium Ingot 4. Aluminium Rod 5. Aluminium Sheet 6. Aluminium Flat Bar 7. Aluminium Tube 8. Aluminium Round Bar 9. Aluminium Square Bar 10. Industri Aluminium (Peleburan menjadi bahan-bahan keperluan rumah

		dan perlakuan tertentu. (Terdapat lebih dari 50 spesifikasi produk hydrate (HIGILITE TM) yang diproduksi oleh PT. ICA. 3. Industri Smelter /Alumina	proses pengolahan dan perlakuan tertentu. (Terdapat lebih dari 50 spesifikasi produk hydrate (HIGILITE TM) yang diproduksi oleh PT. ICA. 3. Smelter/Alumina 4. Aluminium Scrap 5. Aluminium Ingot	tangga, bahan bangunan) 11. Industri Aluminium sebagai bahan baku otomotif
5.	Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	1. Aneka Olahan ikan (surimi, abon, tepung ikan, minyak ikan) 2. Aneka pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut 3. Ikan awet (beku, kering) dan fillet	1. Aneka Olahan ikan (surimi, abon, tepung ikan, minyak ikan) 2. Aneka pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut 3. Produk olahan ikan untuk suplemen pakan ternak dan suplemen budidaya 4. Ikan awet (beku, kering) dan fillet	1. Aneka Olahan ikan (surimi, abon, tepung ikan, minyak ikan) 2. Aneka pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut 3. Produk olahan ikan untuk suplemen pakan ternak dan perikanan budidaya 4. Ikan awet (beku, kering) dan fillet
6.	Industri Pengolahan Kayu	1. Industri komponen berbasis kayu (wood working, laminate dan dfinger joint) 2. Industri furniture 3. Aneka produk berbasis limbah kayu	1. Industri komponen berbasis kayu (wood working, laminate dan dfinger joint) 2. Industri furniture 3. Aneka produk berbasis limbah kayu	1. Industri komponen berbasis kayu (wood working, laminate dan dfinger joint) 2. Wood moulding products 3. Industri furniture 4. Aneka produk berbasis limbah kayu
7.	Industri Pengolahan Tanaman Pangan	1. Industri tepung dari ubi (ubi jalar; ubi kayu= tapioka, mocaf) sebagai substitusi/mengurangi ketergantungan pada terigu/gandum; 2. Industri Pangan darurat; 3. Industri Granulated Composit Flour	1. Industri tepung dari ubi (ubi jalar; ubi kayu= tapioka, mocaf) sebagai substitusi/mengurangi ketergantungan pada terigu/gandum; 2. Industri Pangan darurat; 3. Industri Granulated Composit Flour	1. Industri tepung dari ubi (ubi jalar; ubi kayu= tapioka, mocaf) sebagai substitusi/mengurangi ketergantungan pada terigu/gandum; 2. Industri Pangan darurat; 3. Industri Granulated Composit Flour

b. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Provinsi

Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan di atas dijabarkan sebagai berikut:

1) Industri Pengolahan Karet

Industri pengolahan getah karet IBS di Kalimantan Barat saat ini berjumlah sekitar 18 perusahaan *crumb rubber* yang secara umum memproduksi SIR-20 dan sebagian juga memproduksi SIR-10. Kapasitas masing-masing industri bervariasi, 30 ribu ton per tahun, 25 ribu ton per tahun, dan ada yang hingga 50 ribu ton per tahun. Secara keseluruhan kapasitas industri karet *crumb rubber* di Kalimantan Barat adalah sekitar 520 ribu ton per tahun. Tidak ada industri jenis

lainnya, yang ada adalah satu industri lainnya yaitu industri pengolah kayu karet.

Pembangunan industri berbasis komoditas karet diarahkan pada jenis industri:

- a) Industri *compound/ crumb rubber*
- b) Lateks Pekat dan Industri alat-alat kesehatan
- c) Industri barang dari karet lainnya
- d) Industri kayu karet (*board/ furniture*)

Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Karet Tahun 2017 – 2037

No	Sasaran	Tahun			
		2022	2027	2032	2037
1	Nilai tambah (Rp milyar)	1.444,6	1.951,4	2.749,7	3.966
2	Pertumbuhan (%)	6	7	7,5	8
3	Nilai ekspor (Juta US\$)	754	1.037	1.462	2.108
4	Penyerapan tenaga kerja (orang)	5.165	6.010	6.940	8.008
5	Nilai Investasi (Rp milyar)	309	596	892	1.095

Ekspor karet (khususnya *crumb rubber*) merupakan primadona ekspor Kalimantan Barat. Pada tahun 2013 ekspor karet mencapai 568 juta US\$ atau sekitar 42 persen dari total ekspor Kalimantan Barat (lihat Tabel 2.26), diperkirakan lebih dari 70 persen dari total ekspor produk industri. Sebenarnya CPO merupakan produk ekspor terbesar dari Kalimantan Barat, namun tidak tercatat sebagai produk ekspor Kalimantan Barat karena ekspornya melalui pelabuhan lain di luar Kalimantan Barat. Jika CPO sudah mulai tercatat dalam ekspor Kalimantan Barat, maka secara otomatis kontribusi ekspor karet akan terkonversi.

Penyerapan tenaga kerja industri berbasis karet tidaklah sebesar pada industri makanan maupun perikanan, namun industri ini menampung produk primer karet dari 300 ribu lebih kepala keluarga petani karet. Industri berbasis karet sendiri menyerap sekitar 6 persen tenaga kerja dari total tenaga kerja industri di Kalimantan Barat. Pada tahun 2013 IBS karet menyerap hampir 3 ribu tenaga kerja.

Mengikuti penyerapan tenaga kerja sektor industri sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1, maka tahun 2021

penyerapan tenaga kerja industri karet diperkirakan sebanyak lebih dari 5.100 orang, dan seterusnya.

Investasi industri karet mengalami stagnan pada beberapa tahun, namun diharapkan dalam tahun-tahun kedepan, investasi di industri karet akan mulai bergairah kembali, setidaknya 5 persen akumulatif dari penanaman modal dalam negeri.

Tabel 4.3 Program Pengembangan Industri Pengolahan Karet Tahun 2017 – 2037

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017 - 2022	2022- 2027	2027- 2037
I. Program Pengembangan SDM Karet							
A	Peningkatan kemampuan SDM petani karet						
1	Training/ diklat intensifikasi perkebunan	Disbun	Petani karet	GAPKINDO	√	√	√
2	Workshop/ short course standar pasca panen	Disbun, Disperindag	Petani karet	GAPKINDO, SMK-SMTI	√	√	√
B	Peningkatan kemampuan SDM industri karet						
1	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	Disperindag	Industri karet	GAPKINDO, SMK-SMTI	√	√	√
2	Pendidikan industri karet bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri karet	Disperindag		SMK SMTI, POLNEP	√	√	√
3	Membangun/mendirikan Sekolah Kejuruan/Diploma Jurusan Khusus Karet	Disperindag, Dinas Pendidikan		SMK SMTI, POLNEP	√	√	
II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Karet							
A	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku karet dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan						
1	Intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan karet (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Disbun	Petani karet	GAPKINDO	√	√	√
2	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	Disbun	Petani karet		√	√	√
B	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri						
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen termasuk untuk produksi lateks pekat	Disbun, Disperindag	Petani karet	GAPKINDO	√	√	√
2	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	Disbun	Petani karet	GAPKINDO	√	√	√
III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Karet							
1	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ standar lainnya yang relevant)	Disperindag	Industri karet	GAPKINDO	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017 - 2022	2022- 2027	2027- 2037
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk specific point, ex. Tester, dll.)	Disperindag	Industri karet		√		
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir karet Lateks Pekat dan Industri alat-alat kesehatan, barang dari karet lainnya)	Disperindag	Industri karet, Investor	PUSLIT KARET, BARISTAN INDUSTRI, UNTAN, POL NEP, SMK SMTI, BPPT, BBPKKP	√	√	√
IV. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Karet							
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional	Disperindag	Industri karet	GAPKINDO	√	√	√
2	Kerjasama pengembangan products dan market	Disperindag	Petani Karet, Industri karet	GAPKINDO, PUSLT KARET, BATAN, BPPT,	√	√	√
V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan							
1	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi karet (khususnya untuk industri hilir karet Lateks Pekat dan Industri alat-alat kesehatan, barang dari karet lainnya)	BPMPTSP, Disperindag	Industri karet, Investor		√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/ bank	Disperindag	Industri karet	Perbankan	√	√	√
3	Bimbingan management financial	Disperindag	Industri karet	Perbankan	√		
VI. Program-program Dukungan Lainnya/ Insentif untuk Pengembangan Industri Karet							
a	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	BAPPEDA, DIS-PU, DIS TAMBEN, BLHD, PLN, PDAM, dll.			√	√	√
b	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait; Kerjasama riset maupun special study dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan karet)	BAPPEDA, Disperindag	Industri karet, IKM	Donor	√	√	√
c	Program Pengembangan Perwilyahan Industri (WPPI, KPI, KI, Sentra IKM) khususnya KI Mandor	BAPPEDA, Dinas PU, Disperindag	Industri (Investor)		√	√	√
d	Program Pemberdayaan IKM	Disperindag	IKM		√	√	√
e	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir karet)	BPMPTSP, Disperindag			√	√	√

2) Industri Pengolahan Sawit

Industri pengolahan sawit di Kalimantan Barat hingga 2015 tercatat berjumlah sekitar 51 perusahaan yang secara umum memproduksi CPO, 5 diantaranya adalah perusahaan negara. Dari total 51 industri ini, 4 diantaranya sudah mulai tidak aktif dan 2 lainnya dalam proses ujicoba operasi. Tidak ada industri jenis lainnya, yang ada adalah satu industri lainnya yaitu industri minyak goreng sawit curah. Kapasitas masing-masing industri CPO bervariasi, 60 ton TBS per jam, 45 ton TBS per jam, 30 ton TBS per jam, dan lainnya. Secara keseluruhan kapasitas bahan baku industri sawit ini di Kalimantan Barat adalah sekitar 2.055 ton TBS per jam. Suplai bahan baku mencapai kisaran 1,2 juta ton tahun 2015. Pembangunan industri berbasis komoditas sawit diarahkan pada jenis industri:

- a) *Oleofood*;
- b) *Oleochemical*; dan
- c) Kemurgi (bio diesel)

Sasaran dan program pembangunan industri berbasis komoditas sawit adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Sawit Tahun 2017 – 2037

No	Sasaran	Tahun			
		2022	2027	2032	2037
1	Nilai tambah (Rp milyar)	18.286	23.339	26.406	29.876
2	Pertumbuhan (%)	8	5	3	3
3	Nilai ekspor (Rp milyar)	7.093	9.627	13.314	18.674
4	Penyerapan tenaga kerja (orang)	10.330	12.035	13.880	16.015
5	Nilai Investasi akumulatif (Rp milyar) [termasuk perkebunan sawit)	49.500	95.320	142.660	175.250

Dalam beberapa tahun kedepan pertumbuhan kontribusi industri sawit diperkirakan masih akan bergerak lebih besar daripada komoditas unggulan lainnya, yaitu paling tidak mendekati 8 persen tahun 2022, hingga mencapai lebih dari 18 triliun Rupiah. Berikutnya hingga tahun 2037 dan seterusnya, nilai tambah industri karet diperkirakan mulai terevaluasi akibat luasan lahan yang mulai maksimum sudah terkonversi.

Pertumbuhan lebih disebabkan program intensifikasi dan diversifikasi produk hilir.

Untuk mencapai sasaran diatas, maka ditetapkan program pendukung yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 Program Pengembangan Industri Pengolahan Sawit Tahun 2017 – 2037

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017-2022	2020-2027	2027-2037
I. Program Pengembangan SDM Sawit							
A	Peningkatan kemampuan SDM petani sawit						
1	Training/ diklat intensifikasi perkebunan	Disbun	Petani sawit		√	√	
2	Workshop/ short course standar pasca panen	Disbun, Disperindag	Petani sawit		√	√	
B	Peningkatan kemampuan SDM industri pengolahan sawit						
1	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	Disperindag	Industri sawit		√	√	
2	Pendidikan industri sawit bagi aparat daerah atau Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	Disperindag			√	√	
3	Membangun/mendirikan Sekolah Kejuruan/Diploma Jurusan Khusus Kelapa Sawit	Disperindag, Dinas Pendidikan		SMK SMTI, POLNEP	√	√	
II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Sawit							
A	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku sawit dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan						
1	Intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan sawit (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Disbun	Petani sawit	SMK SMTI, POLNEP, UNTAN	√	√	√
2	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	Disbun	Petani sawit	Asosiasi	√		
B	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri						
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	Disbun	Petani sawit	SMK SMTI, POLNEP, UNTAN	√	√	√
2	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	Disbun	Petani sawit		√		
III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Sawit							
1	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	Disperindag	Industri sawit		√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017-2022	2020-2027	2027-2037
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk specific point, ex. Tester, etc.)	Disperindag	IKM		√		
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir sawit; margarine, minyak goreng dan oleochemical)	Disperindag	Industri sawit, Investor	PPKS, BPPT, Baristan INDUSTRI	√	√	√
IV. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Sawit							
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional	Disperindag	Industri sawit		√	√	√
2	Kerjasama pengembangan produk dan market	Disperindag , BPMPTSP	Industri sawit	Asosiasi	√	√	√
3	Pengembangan 'branded' produk	Disperindag	Industri sawit	Asosiasi	√	√	
V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan							
1	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi (khususnya untuk industri hilir sawit; margarine, minyak goreng dan oleochemical)	BPMPTSP, Disperindag	Industri sawit, Investor		√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/ bank	Disperindag	Industri sawit	Perbankan	√	√	√
3	Bimbingan management financial	Disperindag	Industri sawit	Perbankan	√		
VI. Program-program Dukungan Lainnya/ Insentif untuk Pengembangan Industri Sawit							
A	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappeda, Dinas PU, PLN, Dishub, Distamben, BLHD, PLN PDAM, dll.			√	√	√
B	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait; Kerjasama riset maupun special study dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan sawit)	Bappeda , Disperindag	Industri sawit, IKM	Donor	√	√	√
C	Program Pengembangan Perwilayahan Industri (WPPI, KPI, KI, Sentra IKM) khususnya KI Tayan dan KI Mandor	Bappeda, Dinas PU, Disperindag	Industri (Investor)		√	√	√
D	Program Pemberdayaan IKM	Disperindag	IKM		√	√	√
e	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir sawit)	BPMPTSP, Disperindag			√	√	√

3) Industri Pengolahan Kelapa

Sasaran dan Program pembangunan industri berbasis komoditas kelapa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Kelapa Tahun 2017 – 2037

No	Sasaran	Tahun			
		2022	2027	2032	2037
1	Nilai tambah (Rp milyar)	111,417	159,954	235,025	345,329
2	Pertumbuhan (%)	7	7,5	8	8
3	Nilai ekspor (Ribu US\$)	1.193	1.282	1.385	1.496
4	Penyerapan tenaga kerja (org)	3.000	3.225	3.483	3.975
5	Nilai Investasi (Rp milyar)	25,20	48,85	76,31	95,42

Tabel 4.7 Program Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Tahun 2016 - 2036

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017 - 2022	2022- 2027	2027- 2037
I. Program Pengembangan SDM Kelapa							
A	Peningkatan kemampuan SDM petani kelapa						
1	Training/ diklat intensifikasi perkebunan	Disbun	Petani kelapa		√	√	
2	Workshop/ short course standar pasca panen	Disbun, Disperindag	Petani kelapa		√	√	
B	Peningkatan kemampuan SDM industri kelapa						
1	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	Disperindag	Industri kelapa		√	√	
2	Pendidikan industri kelapa bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri kelapa	Disperindag			√	√	
3	Membangun/mendirikan Sekolah Kejuruan/Diploma Jurusan Khusus Kelapa	Disperindag, Dinas Pendidikan			√	√	
II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Kelapa							
A	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku kelapa dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan						
1	Intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan kelapa (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju	Disbun	Petani kelapa	SMK, SMTI, POLNEP	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017 - 2022	2022- 2027	2027- 2037
	implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)						
2	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	Disbun	Petani kelapa		√		
B	Peningatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri						
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	Disbun	Petani kelapa	SMK SMTI, POLNEP	√	√	√
2	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	Disbun	Petani kelapa		√		
III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Kelapa							
1	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	Disperindag	Industri kelapa		√	√	√
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial)	Disperindag	IKM		√		
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir kelapa)	Disperindag	Industri kelapa, Investor	Baristand, Batan, BPPT	√	√	√
IV. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Kelapa							
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional	Disperindag	Industri kelapa		√	√	√
2	Kerjasama pengembangan products dan market	Disperindag	Industri kelapa	Asosiasi kelapa, Baristand, Batan, BPPT	√	√	√
V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan							
1	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi (khususnya untuk industri hilir kelapa)	BPMPSTP, Disperindag	Industri kelapa, Investor		√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/ bank	Disperindag	Industri kelapa	Perbankan	√	√	√
3	Bimbingan dan pengawasan management financial	Disperindag	IKM	Perbankan	√		
VI. Program-program Dukungan Lainnya/ Insentif untuk Pengembangan Industri Kelapa							
a	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappeda, Dinas PU, Dishub, Distamben,			√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017 - 2022	2022- 2027	2027- 2037
		BLHD, PLN, PDAM, dll.					
b	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait; Kerjasama riset maupun special study dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan kelapa)	Bappeda, Disperindag		Donor	√	√	√
c	Program Pengembangan Perwilyahan Industri (WPPI, KPI, KI, Sentra IKM) khususnya KI	Bappeda, Dinas PU, Disperindag	Industri (Investor)		√	√	√
d	Program Pemberdayaan IKM	Disperindag	IKM		√	√	√
e	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir kelapa)	BPMPTSP, Disperindag			√	√	√

4) Industri Pengolahan Bauksit

Sasaran dan program pembangunan industri berbasis komoditas bauksit adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Sasaran Pembangunan Industri Bauksit Tahun 2017-2037

No	Sasaran	Tahun			
		2022	2027	2032	2037
1	Nilai tambah (Rp milyar)	1.106	1.411	1.801	2.300
2	Pertumbuhan (%)	5	5	5	5
3	Nilai ekspor (Rp milyar)	553	705	900	1.149
4	Penyerapan tenaga kerja (orang)	5000	6500	7500	9000
5	Nilai Investasi akumulatif (Rp milyar)	20.000	20.000	33.000	33.000

Pembangunan pabrik alumina di Tayan dan 2 juta ton per tahun. Jika produksi ini sudah sepenuhnya dapat berjalan pada tahun 2016 maka diperoleh nilai tambah sekitar 1 milyar US\$ atau sekitar 1,3 triliun Rupiah. Dengan asumsi pertumbuhan produksi 5 persen per tahun maka diperoleh nilai tambah sebesar 1.106 milyar Rupiah tahun 2022, dan seterusnya.

Kebutuhan dalam negeri terus meningkat, hingga 2015 kebutuhan dalam negeri mencapai kisaran 800 ribu ton, dan pada tahun 2025 diperkirakan kebutuhan dalam negeri mencapai 2,2 juta ton alumina. Dengan suplai dari Inalum yang diharapkan mencapai 500 ribu ton tahun 2020, maka produksi alumina Kalimantan Barat dapat sedikitnya diekspor sebanyak 50 persen.

Tabel 4.9 Program Pengembangan Industri Bauksit Tahun 2017 – 2037

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017 - 2022	2022- 2027	2027 - 2037
I. Program Pengembangan SDM Penambang Bauksit							
A	Peningkatan kemampuan SDM penambangan bauksit yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan	Distamben			√	√	
B	Peningkatan kemampuan SDM industri						
1	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	Disperindag	Industri Bauksit		√	√	√
2	Pendidikan industri berbasis bauksit bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	Disperindag	Industri Bauksit	PERGURUAN TINGGI, SMK SMTI	√		
3	Membangun/mendirikan Sekolah Kejuruan/Diploma Jurusan Khusus Bauksit	Disperindag, Dinas Pendidikan			√	√	
II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam							
A	Identifikasi dan konsep pemanfaatan/ exploitasi bertanggung jawab yang berwawasan lingkungan	Distamben			√		
B	Penetapan mekanisme pengawasan dan pembinaan	Distamben			√		
C	Pengawasan dan	Distamben			√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017 - 2022	2022-2027	2027 - 2037
	pembinaan						
III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri							
1	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	Disperindag, Distamben	Industri Bauksit		√	√	√
2	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi penambangan	Disperindag, Distamben		PERGURUAN TINGGI, LIPI, Batan, BPPT, Kemen ESDM, dll.	√	√	√
V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan							
1	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi	BPMPTSP, Disperindag,	Industri Bauksit	Perbankan	√	√	√
VI. Program-program Dukungan Lainnya/ Insentif untuk Pengembangan Industri Alumina menjadi aluminium scraf / Aluminium Ingot							
A	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappeda, Dishub, Dinas PU, Distamben, BLHD, PLN, PDAM			√	√	√
B	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait; Kerjasama riset maupun special study dalam pengembangan industri maupun teknologi alumina dan aluminium scraf ; aluminium ingot)	Bappeda, Disperindag	Industri Bauksit	Donor	√	√	√
c.	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait; Kerjasama riset maupun special study dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan alumina - aluminium scraf/ aluminium ingot- : 1. Aluminium Rod 2. Aluminium Sheet 3. Aluminium Flat Bar 4. Aluminium Tube 5. Aluminium Round Bar 6. Aluminium Square Bar 7. Industri Aluminium (Peleburan menjadi bahan-bahan	Bappeda, Disperindag, BPM PTSP, Distamben	Industri Bauksit	KEMENPERIN, PERGURUAN TINGGI, LIPI, Batan, BPPT, Kemen ESDM, dll.			√

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017 - 2022	2022-2027	2027 - 2037
	keperluan rumah tangga, bahan bangunan) 8. Industri Alumunium sebagai bahan baku otomotif						
d.	Program Pengembangan Perwilyahan Industri (WPPI, KPI, KI) khususnya KI Ketapang	Bappeda, Dinas PU, Disperindag, Distamben	Industri Bauksit		√	√	√
e.	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri	BPMPTSP, Disperindag, Distamben			√	√	√

5) Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan

Sasaran dan Program pembangunan industri berbasis komoditas hasil laut dan perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan 20167 – 2037

No	Sasaran	Tahun			
		2022	2027	2032	2037
1	Nilai tambah (Rp milyar)	25,94	31,30	43,89	61,56
2	Pertumbuhan (%)	7	7	7	7
3	Nilai ekspor (Ribu US\$)	5.986	8.394	11.770	16.505
4	Penyerapan tenaga kerja (org)	26.784	37.578	52.715	73.951
5	Nilai Investasi (Rp milyar)	75,01	95,74	122,17	155,92

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan; dan Dinas Perindag (diolah)

Hasil laut dan Perikanan merupakan komoditas pangan yang sangat penting dan memiliki potensi yang besar di Kalimantan Barat, salah satu faktor keberuntungan dari sisi geografis dimana terdapat 7 Kabupaten/Kota yang memiliki akses langsung ke laut, selain itu seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat memiliki sungai dan sebagian memiliki danau dengan potensi hasil ikan yang sangat besar. Potensi hasil laut dan perikanan di Kalimantan Barat sangat memungkinkan dan memiliki prospek yang cerah bila dikembangkan industri pengolahannya. Hal lain yang merupakan salah satu tantangan dalam pengembangan Industri perikanan di Kalimantan Barat adalah besarnya animo / kesadaran masyarakat Kalimantan Barat untuk mengkonsumsi Ikan naik sekitar 11 % pada tahun 2014 (IPB. 2015).

Pengembangan Industri pengolahan hasil Laut dan Perikanan dengan demikian selain memenuhi kebutuhan konsumsi dalam daerah juga memiliki peluang ekspor yang sangat besar.

Tabel 4.11 Program Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2017 – 2037

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017 - 2022	2022- 2027	2027- 2037
I. Program Pengembangan SDM Hasil Laut dan Perikanan							
A	Peningkatan kemampuan SDM Perikanan						
1	Training/ diklat intensifikasi Hasil Laut dan Perikanan	Dis KP	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	
2	Workshop/ short course standar pasca panen	Dis KP	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	
B	Peningkatan kemampuan SDM industri Hasil Laut dan Perikanan						
1	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	Disperindag	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	
2	Pendidikan industri Hasil Laut dan Perikanan bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri Hasil Laut dan Perikanan	Disperindag	Pelaku Usaha Hasil Laut dan Perikanan Perguruan Tinggi		√	√	
3	Membangun/mendirikan Sekolah Kejuruan/Diploma Jurusan Khusus Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	Disperindag, Dinas Pendidikan	Perguruan Tinggi		√	√	
II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Hasil Laut dan Perikanan							
A	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku hasil laut dan perikanan dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan						
1	Intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi Budi daya Perikanan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Dis KP	Pelaku Usaha Perikanan	SMK, SMTI, POLNEP/ Perguruan Tinggi	√	√	√
2	Fasilitasi, benih yang berkualitas	Dis KP	Pelaku Usaha Perikanan		√		
B	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri						
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan	Dis KP	Pelaku Usaha Perikanan	SMK, SMTI, POLNEP/	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017 - 2022	2022- 2027	2027- 2037
	implementasi penerapan teknologi pasca panen			Perguruan Tinggi			
2	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	Disperindag, Dis KP	Pelaku Usaha Perikanan		√		
III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Hasil Laut dan Perikanan							
1	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	Disperindag	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	√
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial)	Disperindag	Pelaku Usaha Perikanan		√		
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir kelapa)	Disperindag	Pelaku Usaha Perikanan	Balitbangda, Baristand, Perguruan Linggi	√	√	√
IV. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Hasil Laut dan Perikanan							
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional	Disperindag	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	√
2	Kerjasama pengembangan products dan market	Disperindag	Pelaku Usaha Perikanan	Baristand, Batan, BPPT	√	√	√
V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan							
1	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi (khususnya untuk industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan)	BPMPTSP, Disperindag	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/ bank	Disperindag	Pelaku Usaha Perikanan	Perbankan, Lembaga Non Bank	√	√	√
3	Bimbingan dan pengawasan management financial	Disperindag	IKM	Perbankan, Lembaga Non Bank	√		
VI. Program-program Dukungan Lainnya/ Insentif untuk Pengembangan Industri Hasil Laut dan Perikanan							
A	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappeda, Dinas PU, Dishub, DKP BLHD, PLN,			√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017 - 2022	2022- 2027	2027- 2037
		PDAM, dll.					
B	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait; Kerjasama riset maupun special study dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan Hasil Laut dan Perikanan)	Bappeda, Disperindag		Donor	√	√	√
C	Program Pengembangan Perwilyahan Industri (WPPI, KPI, KI, Sentra IKM) khususnya KI	Bappeda, Dinas PU, Disperindag	Industri (Investor)		√	√	√
D	Program Pemberdayaan IKM	Disperindag	IKM		√	√	√
E	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri pengolahan hasil laut dan perikanan)	BPMPTSP, Disperindag			√	√	√

6) Industri Pengolahan Kayu

Sasaran dan Program pembangunan industri berbasis komoditas kayu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Kayu Tahun 2017 – 2037

No	Sasaran	Tahun			
		2022	2027	2032	2037
1	Nilai tambah (Rp milyar)	88.063	94.164	107.981	123.819
2	Pertumbuhan (%)	7	7	7,5	8
3	Nilai ekspor (Ribu US\$)	145.226,8	202.617,13	284.181,00	385.470,57
4	Penyerapan tenaga kerja (org)	28.866	30.886	33.203	35.859
5	Nilai Investasi (Rp milyar)	2.150,7	2.301,25	2.473,84	2.671,75

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Dinas Perindag Prov. Kalbar (diolah)

Dilihat dari besarnya nilai tambah, jumlah tenaga kerja yang terserap serta nilai ekspor produk olahan kayu di Kalimantan Barat, maka komoditas kayu memiliki potensi yang cukup besar jika dikembangkan pengolahan disektor hilirnya. Besarnya jumlah produksi

kayu bulat baik yang berasal dari Hutan Hak Penguasaan Hutan (HPH), Non HPH, Hak Penguasaan Hasil Hutan dan Hutan Tanaman Industri pada tahun 2015 mencapai 747.959,71 M3 merupakan suatu potensi yang sangat besar lagi jika dapat ditingkatkan pengolahannya lebih lanjut sampai kepada Industri komponen berbasis kayu (wood working, laminate dan dfinger joint), industri furniture serta Aneka produk berbasis limbah kayu

Tabel 4.13 Program Pengembangan Industri Pengolahan Kayu Tahun 2017 - 2037

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017 - 2022	2022- 2027	2027 - 2037
I. Program Pengembangan SDM Kayu							
A	Peningkatan kemampuan SDM Industri Pengolahan Kayu						
1	Training/ Diklat intensifikasi HTI	Dishut	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	
2	Workshop/ short course standar pasca panen	Dishut, Disperindag	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	
B	Peningkatan kemampuan SDM industri pengolahan kayu						
1	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	Disperindag	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	
2	Pendidikan industri kelapa bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri pengolahan kayu	Disperindag			√	√	
3	Membangun/mendirikan Sekolah Kejuruan/Diploma Jurusan Khusus Industri Pengolahan kayu	Disperindag, Dinas Pendidikan			√	√	
II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Kayu							
A	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku kayu dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan						
1	Intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan kelapa (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju	Dishut	Pelaku Usaha pengolahan Kayu	SMK, SMTI, POLNEP	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017 - 2022	2022-2027	2027 - 2037
	implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)						
B	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri						
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	Dishut	Pelaku Usaha pengolahan Kayu	SMK SMTI, POLNEP	√	√	√
2	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	Disperindag, Dishut	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√		
III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Kayu							
1	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO atau standar lainnya yang relevant)	Disperindag	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial)	Disperindag	IKM		√		
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri pengolahan kayu)	Disperindag	Industri kelapa, Investor	Baristand, Batan, BPPT	√	√	√
IV. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Kayu							
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional	Disperindag	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√
2	Kerjasama pengembangan products dan market	Disperindag	Pelaku Usaha pengolahan Kayu	Asosiasi Industri Pengolahan Kayu Baristand, Batan, BPPT	√	√	√
V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan							
1	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi (khususnya untuk industri hilir pengolahan kayu)	BPMPTSP, Disperindag	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/ bank	Disperindag	Pelaku Usaha pengolahan Kayu	Perbankan, Lembaga Non Bank	√	√	√
3	Bimbingan dan pengawasan management financial	Disperindag	IKM	Perbankan, Lembaga Non Bank	√		
VI. Program-program Dukungan Lainnya/ Insentif untuk Pengembangan Industri Kayu							

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017 - 2022	2022-2027	2027 - 2037
a	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappeda, Dinas PU, Dishub, Distamben, BLHD, PLN, PDAM, dll.			√	√	√
b	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait; Kerjasama riset maupun special study dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan kayu)	Bappeda, Disperindag Balitbangda		Donor	√	√	√
c	Program Pengembangan Perwilyahan Industri (WPPI, KPI, KI, Sentra IKM)	Bappeda, Dinas PU, Disperindag	Industri (Investor)		√	√	√
d	Program Pemberdayaan IKM	Disperindag	IKM		√	√	√
e	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir pengolahan Kayu)	BPMPTSP, Disperindag			√	√	√

7) Industri Pengolahan Tanaman Pangan

Sasaran dan Program pembangunan industri berbasis komoditas tanaman pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Tanaman Pangan Tahun 2017 – 2037

No	Sasaran	Tahun			
		2022	2027	2032	2037
1	Nilai tambah (Rp milyar)	8,94	16,30	26,25	42,28
2	Pertumbuhan (%)	9,5	10	10	10
3	Nilai ekspor (Ribu US\$)	2.054,04	3.308,05	5.327,66	8.580,24
4	Penyerapan tenaga kerja (org)	989	1.083	1.191	1.310
5	Nilai Investasi (Rp milyar)	24,94	40,17	64,69	104,18

ata : Disperindag Prov. Kalbar (diolah)

Catatan: Untuk Nilai Ekspor Pengolahan Tanaman Pangan, adalah akumulasi dari produk olahan yang terdiri dari kelompok komoditas yaitu : Olahan dari Tepung; Gandum-gandum; dan Berbagai manakan Olahan.

Tanaman pangan merupakan salah satu komoditas yang memiliki prospek yang cukup potensial jika dikembangkan, hal tersebut mengingat industri pangan merupakan subsektor industri Pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kalimantan Barat. Tanaman pangan sebagai bagian dari kelompok komoditi bahan baku perlu didorong pengembangannya, terutama yang dapat diolah menjadi bahan tepung seperti padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Kedepan pengembangan pengolahan berbagai tanaman pangan menjadi tepung sebagai bahan baku pangan dinilai sangat strategis antara lain dalam rangka mengurangi impor tepung terigu yang setiap tahunnya hampir mencapai 30.000 ton harus didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kalimantan Barat. Dari sisi pengembangan tanaman pangan tersebut di atas di Kalimantan Barat memiliki peluang yang sangat besar mengingat areal yang dapat ditanami masih tersedia cukup luas.

Tabel 4.15 Program Pengembangan Industri Pengolahan Tanaman Pangan Tahun 2017 – 2037

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017 - 2022	2022- 2027	2027- 2037
I. Program Pengembangan SDM Tanaman Pangan							
a	Peningkatan kemampuan SDM petani Tanaman Pangan						
1	Training/ diklat intensifikasi perkebunan	Distan & Horti	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	
2	Workshop/ short course standar pasca panen	Distan & Horti, Disperindag	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	
b	Peningkatan kemampuan SDM industri kelapa						
1	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri Pengolahan Tanaman Pangan	Disperindag	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	
2	Pendidikan industri pengolahan Tanaman Pangan bagi aparat daerah/ Training of	Disperindag			√	√	

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017 - 2022	2022- 2027	2027- 2037
	trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri Pengolahan Tanaman Pangan & Horti						
3	Membangun/mendirikan Sekolah Kejuruan/Diploma Jurusan Khusus Tanaman Pangan & Horti	Disperindag, Dinas Pendidikan			√	√	
II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tanaman Pangan							
a	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku kelapa dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan						
1	Intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi pertanian tanaman pangan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Distan & Horti	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan	Perguruan Tinggi, SMK, SMTI, POLNEP	√	√	√
2	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	Distan & Horti	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√		
b	Peningatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri						
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	Distan & Horti	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan	SMK SMTI, POLNEP	√	√	√
2	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	Distan & Horti, Disperindag	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√		
III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tanaman Pangan							
1	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	Disperindag	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	√
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial)	Disperindag	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√		
3	Kerjasama Riset dan	Disperindag	Pelaku	Baristand,	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017 - 2022	2022- 2027	2027- 2037
	Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri pengolahan tanaman Pangan)		Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan	Batan, BPPT			
IV. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Tanaman Pangan							
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional	Disperindag	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	√
2	Kerjasama pengembangan products dan market	Disperindag	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan	Asosiasi kelapa, Baristand, Batan, BPPT	√	√	√
V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan							
1	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi (khususnya untuk industri pengolahan tanaman pangan)	BPMPTSP, Disperindag	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/ bank	Disperindag	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan	Perbankan	√	√	√
3	Bimbingan dan pengawasan management financial	Disperindag	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan	Perbankan	√		
VI. Program-program Dukungan Lainnya/ Insentif untuk Pengembangan Industri Pengolahan Tanaman Pangan							
a	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappeda, Dinas PU, Dishub, Distamben, BLHD, PLN, PDAM, dll.	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	√
b	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait; Kerjasama riset maupun special study dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan tanaman pangan)	Bappeda, Disperindag	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan	Donor	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2017 - 2022	2022- 2027	2027- 2037
c	Program Pengembangan Perwilayahan Industri (WPPI, KPI, KI, Sentra IKM) khususnya KI	Bappeda, Dinas PU, Disperindag	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan, Investor		√	√	√
d	Program Pemberdayaan IKM	Disperindag	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	√
e	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri pengolahan tanaman pangan))	BPMPTSP, Disperindag			√	√	√

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Sebagaimana tertuang dalam RIPIN, Kalimantan Barat bergabung dalam satu WPI Kalimantan Bagian Barat bersama dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam konteks Industri Prioritas Nasional, industri yang sesuai di Kalimantan Barat antara lain adalah industri pangan khususnya industri pengolahan minyak nabati (sawit dan kelapa dalam), dan Industri Aneka dan Kimia Dasar, khususnya industri karet alam, dan industri logam dasar khususnya alumina (bauksit), industry pengolahan hasil laut dan perikanan, industri pengolahan kayu dan industry pengolahan tanaman pangan.

Kalimantan Barat juga memiliki WPPI yang juga tertuang dalam RIPIN. Dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi ini, Gubernur dapat mengacu pada pengembangan wilayahnya apakah sebagai bagian dari Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan sebagai daerah pendukung WPPI. Khusus untuk provinsi yang

terdapat WPPI, termasuk Kalimantan Barat dan kabupaten/ kota yang menjadi bagian dari WPPI didalamnya, maka dalam rencana pembangunan industrinya harus menyusun program-program untuk pengembangan dan penguatan WPPI.

Sementara itu, untuk kabupaten/ kota yang tidak terdapat dan tidak menjadi bagian dari WPPI, dapat menyusun program pengembangan industrinya sebagai pendukung WPPI.

Pontianak – Mempawah – Landak – Sanggau – Ketapang – Sambas – Bengkayang merupakan WPPI Provinsi Kalimantan Barat, maka dalam rencana pembangunan industrinya harus menyusun program-program untuk pengembangan dan penguatan WPPI ini. Sementara itu, untuk 8 kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat yang tidak terdapat dan tidak menjadi bagian dari WPPI tersebut, dapat menyusun program pengembangan industrinya sebagai pendukung WPPI.

Oleh karena itu, maka program-program dimaksud harus disusun, diantaranya adalah:

- 1) Percepatan Pembangunan penyiapan fasilitas terkait WPPI pada tiap-tiap kabupaten/ kota WPPI.
- 2) Pengembangan industri sebagai pendukung WPPI untuk kabupaten/ kota non WPPI.

b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pengembangan industri yang diarahkan pada kawasan budidaya untuk peruntukan industri di Kalimantan Barat adalah mencakup:

- 1) Kawasan industri berada di Semparuk, Singkawang, Sungai Raya Kepulauan, Sungai Kunyit, Mandor, Pontianak, Tayan, Teluk Batang, Ketapang, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Badau, Aruk dan Sintang; dan
- 2) Kawasan industri khusus pertambangan di Sungai Kunyit, Tayan, Kendawangan, dan Tanjung Api.

KPI ini masuk dalam penetapan tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/ kota, sehingga masing-masing kabupaten/ kota harus merencanakan, melegalkan (termasuk mencantumkan dalam dokumen tata ruang wilayah masing-masing), dan merealisasikannya sesuai dengan kepentingan pembangunan

industri dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lingkungan.

c. Pembangunan Kawasan Industri (KI)

Diantara kawasan industri yang sedang dikembangkan adalah Kawasan Industri Mandor di Kabupaten Landak, Kawasan Industri Ketapang (Matan Hilir Selatan) di Kabupaten Ketapang, Kawasan Industri Sempuruk di Kabupaten Sambas, dan Kawasan Industri Tayan di Kabupaten Sanggau.

Dalam pengembangannya masing-masing Kawasan Industri ini masih perlu banyak dukungan Kebijakan pemerintah terutama terkait dengan ketersediaan fasilitas seperti sarana dan prasarana basis KI, tersedianya energi listrik, air bersih, pelabuhan, energi, transportasi. Masing-masing Kawasan Industri ini diarahkan pada upaya fokus industri utama, diantaranya KI Mandor untuk pengembangan industri berbasis komoditas karet, KI Tayan diarahkan untuk pengembangan industri berbasis komoditas sawit, KI Ketapang untuk pengembangan industri berbasis komoditas bauksit, dan lainnya, KI Sempuruk untuk Pengembangan Agro Industri. Berikutnya harus disusun insentif yang disiapkan agar realisasi masuknya industri ke KI dapat terwujud.

d. Pengembangan Sentra IKM

Selain industri besar dan menengah (yang difasilitasi pengembangannya melalui KI) pembangunan industri daerah harus memperhatikan IKM daerah. Maka harus ada program yang terkait dengan fasilitasi pengembangan IKM melalui sentra-sentra IKM dimaksud. Sebagaimana sentra pada umumnya maka pengembangan sentra IKM ini termasuk didalamnya adalah tersedianya sarana dan prasarana sentra. Pemerintah juga harus memberikan insentif khusus agar IKM dapat tumbuh dan sentra ini pun juga dapat tumbuh berkembang. Pada setiap Kabupaten/Kota diharapkan minimal dapat dibangun 1 (satu) Sentra Baru IKM (*by desain*) disamping menata kembali pusat/area kegiatan IKM yang sudah ada sebagai sebuah Sentra pada setiap Kabupaten/Kota. Berikut ini diantara program-program prioritas pengembangan perwilayahan industri di Kalimantan Barat yang paling tidak harus dimunculkan dalam rencana pengembangan perwilayahan industri di Kalimantan Barat.

Tabel 4.16 Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
A	Pengembangan WPPI			
1	Koordinasi yang intensif dengan SKPD kabupaten/ kota yang masuk dalam WPPI (Pontianak, Mempawah, Landak, Sanggau, Ketapang, Sambas dan Bengkayang)	√	√	√
2	Penyusunan program bersama untuk percepatan pengembangan dan penguatan WPPI (penyiapan fasilitas terkait WPPI)	√		
3	Penyusunan program khusus untuk masing-masing kabupaten/ kota yang termasuk dalam WPPI	√		
4	Sosialisasi dan penyusunan program khusus untuk kabupaten/ kota yang tidak termasuk dalam WPPI	√		
5	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	√	√	√
B	Pengembangan KPI			
1	Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI masing-masing kabupaten/ kota termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	√	√	√
2	Penyiapan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	√		
3	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	√	√	√
C	Pembangunan KI			
1	Pengkajian mendalam konsep untuk pemprioritasan KI di Kalimantan Barat (khususnya prioritas untuk mendukung pembangunan industri komoditas unggulan, seperti KI Mandor untuk Karet, KI Tayan untuk sawit, KI Semparuk untuk kelapa, pengolahan hasil laut dan perikanan, industri pengolahan kayu, industri pengolahan tanaman pangan dan KI Ketapang untuk Bauksit	√		
2	Percepatan penuntasan permasalahan dan konsep pengembangan KI prioritas serta kelengkapan administrative dan regulasinya	√		
3	Percepatan penuntasan permasalahan dan pembebasan lahan utama KI prioritas	√		
4	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana KI prioritas, termasuk diantaranya penyiapan dan realisasi penyediaan jaringan jalan, energy listrik dan air bersih, serta jaringan komunikasi	√		

No	Program	Tahun		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
5	Insentif khusus untuk industri yang masuk dalam KI	√	√	
6	Pengembangan berkelanjutan untuk KI dan kawasan lainnya	√	√	
D	Pengembangan Sentra IKM			
1	Identifikasi sentra potensial dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangannya	√		
2	Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/ pusat promosi	√	√	
3	Insentif khusus untuk IKM dalam sentra	√	√	

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumberdaya industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya industri di suatu daerah. Tanpa sumberdaya ini maka industri tentu tidak akan tumbuh. Sumberdaya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pelaku pelaksana industri adalah sumberdaya manusia, sehingga untuk membangun industri yang kuat, industri yang tumbuh dan berkembang, pasti diperlukan sumberdaya manusia industri yang kuat juga, dalam arti para pelaku industri memenuhi kebutuhan pembangunan industri itu sendiri baik secara kualitas maupun kuantitas. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumberdaya manusia industri dimaksud.

Tabel 4.17 Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2017 – 2037

No	Program	Tahun		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
1.	Peningkatan kemampuan SDM petani khususnya karet, sawit, dan kelapa, hasil laut dan perikanan, kayu dan tanaman pangan			
a	Training/ diklat intensifikasi perkebunan	√		
b	<i>Workshop/ short course</i> standar pasca panen	√		
2.	Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri			
a	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	√		
b	Pendidikan industri khususnya karet, sawit, dan kelapa, hasil laut dan perikanan, kayu, dan tanaman pangan bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	√		
3.	Pengembangan balai/ sentral pelatihan industri/ lembaga pendidikan komoditas dan industri unggulan		√	√
4.	Membangun/mendirikan sekolah kejuruan/Diploma khusus komoditas Karet, Sawit, Kelapa dan Bauksit, Hasil Laut dan Perikanan, Kayu, dan Tanaman Pangan	√	√	

Pada periode 2017-2022 program 1a dan 1b dilaksanakan untuk sedikitnya hingga 10 persen dari petani aktif dan potensial, sedangkan untuk program 2a dilaksanakan untuk wakil dari sedikitnya hingga 90 persen unit industri IBS dan 20 persen IKM. Melalui program 2b diharapkan ada sedikitnya masing-masing 1 orang ahli industri karet, sawit dan lainnya pada setiap institusi kabupaten/kota yang relevant, dan sedikitnya 2 orang di tingkat provinsi untuk industri masing-masing komoditas.

b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumberdaya Alam

Sumberdaya alam merupakan basis pengembangan industri dalam RPIP ini, sehingga berbagai hal terkait dengan pemanfaatannya, penyediaannya dan penyaluran sumberdaya alam ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dalam RPIP ini. Sebagai provinsi dengan luasan wilayah yang sangat besar, Kalimantan Barat memiliki berbagai sumberdaya alam yang besar dan sebagiannya sangat potensial dikembangkan industrinya.

Khusus di Kalimantan Barat ini, maka potensi sumberdaya ini sangat kuat pada sub-sektor Perkebunan. Sub-sektor ini dikontribusi begitu sangat kuat khususnya dari 2 komoditas utamanya yaitu karet dan sawit. Industri yang hingga saat tumbuh di Kalimantan Barat juga berbasis pada 2 komoditas ini. Selain itu komoditas hasil laut dan perikanan, kayu dan tanaman pangan juga sangat penting dan potensial untuk dikembangkan. Maka terhadap komoditas utama tersebut di atas haruslah dapat dimanfaatkan secara optimal, disediakan dan disalurkan secara pasti dan kontinue (baik kuantitasnya maupun kualitasnya) untuk tumbuh dan berkembangnya industri daerah. Oleh karena itu harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumberdaya manusia industri dimaksud.

Tabel 4.18 Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2017 - 2037

No	Program	Tahun		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
1.	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan, khususnya karet, sawit, dan kelapa, hasil laut dan perikanan, kayu, dan tanaman pangan	√	√	√
a	Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	√	√	√
b	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	√		
c	Pengendalian hama dan penyakit tanaman	√	√	√

No	Program	Tahun		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
2.	Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku industri)	√	√	√
3.	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri			
a	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	√		
b	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	√		
c	Monitoring hasil dan standarisasi	√	√	√

Pada periode 2017-2022 program 1a ditargetkan untuk semua petani aktif potensial, sedangkan 1b untuk sedikitnya hingga 10 persen dari petani aktif dan potensial. Program 1c sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab SKPD terkait, berkoordinasi secara intensif dengan lembaga nasional pengendali hama dan penyakit tanaman. Untuk program 2, setidaknya seluruh perkebunan potensial terhubung oleh jalan usaha tani. Seperti halnya program 1a dan 1b, maka program 3a ditargetkan untuk semua petani aktif potensial, sedangkan 3b untuk sedikitnya hingga 10 persen dari petani aktif dan potensial. Program 3c sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab SKPD terkait, berkoordinasi secara intensif dengan pelaku usaha industri dan lembaga riset pasca panen.

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud.

Tabel 4.19 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri 2017-2037

No	Program	Tahun		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
1	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	√	√	√

No	Program	Tahun		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk <i>home industri</i>)	√	√	√
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan (seperti dengan Balitri Puslitbun, Batan, BPPT, Balai Besar Penelitian Karet, Kulit dan Plastik [BBPKKP], dll.)	√	√	√

Dengan program 1 diharapkan seluruh industri IBS sudah menerapkan setidaknya SNI secara konsisten. Program 2 khusus untuk IKM dan home industri khususnya yang potensial. Sedangkan melalui program 3, SKPD terkait harus memfasilitasi terwujudnya kerjasama riset dan pengembangan industri maupun proses produksi yang dibutuhkan daerah.

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Untuk meningkatkan daya saing dan agresifitas pasar dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang terus-menerus. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya kreatifitas dan inovasi industri dimaksud.

Tabel 4.20 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional (termasuk informasi harga untuk petani, dll.)	√	√	√
2	Kerjasama pengembangan products dan market (dengan assosiasi, dll.)	√	√	√
3	Pengembangan 'branded' produk Kalimantan Barat	√	√	√

Melalui program pertama (1) diharapkan semua *stakeholders*/petani/pelaku industri yang relevan termasuk IKM dapat memanfaatkan media informatika/internet secara professional. Pemerintah daerah harus mendorong agar penyediaan layanan media informatika/ internet yang dibutuhkan dapat terpenuhi secara baik. Kreatifitas dan inovasi dapat muncul melalui kerjasama-kerjasama pengembangan, seperti program 2. Dengan

kreatifitas dan inovasi ini akan diperoleh suatu tataran produk dan proses produksi yang relative berdaya saing spesifik, maka dalam tataran ini pengembangan 'branded' produk dalam program 3 menjadi langkah strategis untuk memunculkan image positif produk daerah dan daya saing produk. Namun, kreatifitas dan inovasi ini tidak boleh berhenti dikembangkan dan harus paling tidak untuk terus dipertahankan agar image tersebut juga tetap terjaga

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pembiayaan sering merupakan permasalahan yang menjadi kendala tumbuh-berkembangnya industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pembiayaan industri dimaksud tidak menjadi masalah.

Tabel 4.21 Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2017 - 2037

No	Program	Tahun		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
1	Fasilitasi dan insentif investasi	√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga financial/ bank dan Non Bank	√	√	√
3	Bimbingan/ training management financial	√	√	√

Pembiayaan/ modal terkadang dapat diperoleh dari pihak kedua yaitu lembaga financial atau bank, namun terkadang juga langsung datang dari pihak pertama yaitu pelaku usaha itu sendiri dalam bentuk investasi maupun dalam bentuk kerjasama investasi. Oleh karena itu program 1 dan program 2, haruslah menjadi perhatian pemerintah untuk sungguh-sungguh difasilitasi secara berkelanjutan. Bagaimanapun permodalan dalam pembangunan apapun termasuk pembangunan industri adalah aspek yang bersifat pasti diperlukan dan juga menentukan.

Hanya saja permasalahan permodalan terkadang bukan semata pada ada atau tidaknya modal, namun pada pengelolaan atau management financial-nya. Lemahnya management financial permodalan yang tersedia (khususnya pada IKM) menjadikan pengembangan sering berujung pada kegagalan. Oleh karena itu,

dibutuhkan program 3 untuk memastikan efektifitas permodalan berujung pada pembangunan yang diharapkan.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Selain pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis yang dalam faktanya berhubungan secara langsung dengan keberhasilan pembangunan industri. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri ini yang integrated dengan Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas di atas. Penting juga untuk memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam RPJM Provinsi Kalimantan Barat.

Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan telekomunikasi; dan infrastruktur/ pengelolaan lingkungan. Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Lingkungan

Penjabaran program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan pengendalian bencana banjir dan abrasi pantai;
Pada tahun 2011 dan awal tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya hampir sebagian besar kecamatan di kabupaten/ kota mengalami bencana banjir dengan ketinggian air di atas 30 cm sampai 150 cm di atas permukaan tanah. Selain terjadi banjir, juga rawan akan terjadinya abrasi pantai terutama untuk daerah pesisir yang meliputi Kabupaten Pontianak, Bengkayang, Singkawang, Sambas, Kubu Raya, Ketapang dan Kayong Utara.
- 2) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa;
Kondisi tingkat jaringan irigasi rawa pada umumnya masih perlu mendapat perhatian karena masih didominasi semi teknis sebesar 14.465 ha (65,1%), Teknis 4.332 ha (19,49%) dan sederhana 3.422 ha (15,40 %). Dengan kondisi baik sebesar 45,78%, kondisi rusak ringan sebesar 14,64% dan kondisi rusak berat sebesar 39,58%.

Tabel 4.22 Program Pembangunan Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan di Kalimantan Barat Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
1	Peningkatan pengendalian bencana banjir dan abrasi pantai	√	√	√
2	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa	√	√	√
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√

b. Lahan

Lahan sering kali menjadi permasalahan yang dihadapi dan menjadi penghambat dalam pengembangan industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan lahan dimaksud tidak menjadi masalah.

Khusus untuk Kawasan Industri (KI), pembebasan lahan sangat menentukan progress implementasi KI, namun pada umumnya pengembangan KI terkait lahan terbagi dalam paling tidak 2 pendekatan yaitu lahan utama dan lahan pengembangan. Dalam masalah lahan ini, pembebasan lahan utama pada semua KI yang dikembangkan di Kalimantan Barat harus tuntas dalam periode 2016-2021 hingga proses implementasi KI juga bisa berjalan. Pengembangan berikutnya (lahan pengembangan) dituntaskan keseluruhan pada periode berikutnya.

Tabel 4.23 Program Penyediaan Lahan untuk Industri Tahun 2017- 2037

No	Program	Tahun		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
1	Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku	√		
2	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	√	√	√
3	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan	√	√	√
4	Pembebasan lahan KI	√	√	√

Sangat penting dijalankan dalam masalah lahan ini : bagaimana pembangunan industri tidak memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

c. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Disamping media komunikasi tulisan (surat kabar, majalah, bulletin, dan lain-lain) maupun dengan sarana audio-visual (radio, televisi, dan jaringan lainnya) yang relative sudah memiliki jangkauan yang luas, Pengembangan aspek telekomunikasi yang sangat penting saat ini adalah media komunikasi telepon (khususnya telepon seluler) dan internet. Peningkatan layanan komunikasi telepon ini dan internet harus terus ditingkatkan. Industri saat ini sangat dipengaruhi perkembangannya oleh layanan komunikasi ini.

Berikut ini diantara program-program prioritas pengembangan jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi di Kalimantan Barat yang diuraikan diatas yang berhubungan dengan pembangunan sektor industri.

Program pembangunan jaringan telekomunikasi di Kalimantan Barat tahun 2017-2037 ditampilkan pada Tabel 4.24, di bawah ini.

d. Jaringan Sumber Daya Air

Tingkat pelayanan air bersih perpipaan masih rendah yaitu 49,74% (masih di bawah target rencana MDGs Tahun 2015 yaitu 80% untuk perkotaan dan 60% untuk pedesaan). Hal ini disebabkan karena (i) luasnya jangkauan wilayah pelayanan serta terbatasnya kapasitas produksi sumber air bersih PDAM; (ii) adanya interusi air laut terutama pada waktu musim kemarau; (iii) mayoritas masyarakat masih menggunakan sumber air permukaan (danau, sungai, kolam) maupun sumber air hujan hal ini disebabkan sumber air baku yang masih tersedia cukup banyak serta merupakan kebiasaan dari masyarakat.

Jaringan Air Bersih: Dalam pembangunan sarana air bersih di Kalimantan Barat memanfaatkan sumber air baku dengan pengelolaan membagi wilayah layanan berdasarkan zonasi pengembangan dari hulu (Kapuas Hulu/ Danau Sentarum) hingga ke wilayah pesisir. Dalam aspek pembangunan industri yang diarahkan pengembangannya melalui Kawasan Industri maka penyediaan air bersih di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan kawasan industri itu sendiri.

Tabel 4.24 Program Pembangunan Jaringan Air, Listrik, dan Telekomunikasi Kalimantan Barat Tahun 2017 - 2037

No	Program	Tahun		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
1	Peningkatan pelayanan air bersih (peningkatan volume dan jangkauan layanan) - [PDAM]	√	√	√
2	Peningkatan pelayanan listrik (peningkatan kapasitas daya dan jangkauan layanan) - [PLN]	√	√	√
3	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/ seluler dan internet) - [untuk Telkom, dll.]	√	√	√

e. Jaringan Sanitasi

Penjabaran program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase);

Secara umum akses masyarakat terhadap sanitasi masih rendah, karena pemerintah daerah belum mampu menyediakan sanitasi yang layak, seperti: (i) pengelolaan sampah masih menggunakan sistem open dumping (sistem terbuka); (ii) belum adanya sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang melayani masyarakat; serta (iii) masih terjadinya genangan air karena sistem drainase yang kurang memadai. Dari permasalahan tersebut mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

- 2) Pembangunan TPA Regional;

Dalam upaya mewujudkan Rencana Program Pemerintah Provinsi dalam bidang Sanitasi, Energi dan penurunan gas emisi telah dilakukan suatu kerjasama antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sanggau tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional di Kabupaten Kubu Raya. Diharapkan dengan adanya TPA Sampah Regional ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pengelolaan sampah, serta dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik.

Tabel 4.25 Program Pembangunan Infrastruktur/Sanitasi di Kalimantan Barat Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
1	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	√	√	√
2	Pembangunan TPA Regional	√		
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi	√	√	√

f. Jaringan Transportasi

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa aspek transportasi khususnya berupa jaringan jalan dan pelabuhan sangat menentukan kuat dan lemahnya pembangunan industri. Oleh karena itu dalam pembangunan industri provinsi ini, pengembangan aspek transportasi ini khususnya jaringan jalan dan pelabuhan harus secara sinergi dituangkan dalam program-program untuk diupayakan secara maksimal diwujudkan. Aspek transportasi di Kalimantan Barat secara umum mencakup Jalan, Pelabuhan, Airport, Kereta Api, dan ASDP. Walaupun demikian khusus untuk kereta api rencana pengembangannya masih dalam kajian dan *Feasibility Study* (FS) oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan ASDP diprioritaskan diarahkan untuk dikembangkan dalam rencana masih untuk penyeberangan.

1) Peningkatan Jaringan Jalan

Dalam Sub-bab 2.1.5, diuraikan beberapa program besar pembangunan jaringan jalan di Kalimantan Barat yaitu Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan dan Jalan Akses Perbatasan, Pembangunan Jalan Lingkar Luar (*Outer Ring Road*) dan Kanal Lingkar Luar (*Outer Ring Canal*), serta Pembangunan Jalan Trans Kalimantan dan Jembatan Tayan. Disamping program-program besar ini perbaikan jalan eksisting juga penting dilakukan mengingat sebagian besar jalan-jalan di Kalimantan Barat berada dalam kondisi tidak mantap. Program betterment, kondisi jalan mantap di Kalimantan Barat hingga tahun 2018 diharapkan dapat mencapai kisaran 84 persen, dan tahun 2022 diharapkan mendekati 90 persen.

RPJM Provinsi Kalimantan Barat mengangkat beberapa isu dalam pembangunan jalan antara lain adalah:

- a) Percepatan Pembangunan Jalan Lingkar Luar (*Outer Ring Road*) dan Kanal Lingkar Luar (*Outer Ring Canal*);

Kondisi Kota Pontianak dan sekitarnya saat ini sudah semakin berkembang pesat, hal ini ditandai dengan seringnya terjadi kemacetan pada jam sibuk yang disebabkan oleh kapasitas jalan yang terbatas. Oleh sebab itu perlu adanya solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan rencana pembangunan Jalan Lingkar Luar (*Outer Ring Road*) atau Kanal Lingkar Luar (*Outer Ring Canal*), yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, pengembangan wilayah, mengendalikan banjir, mengurangi genangan air, serta untuk meningkatkan wisata air.

- b) Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan;

Kondisi transportasi jalan masih perlu mendapat perhatian serta perlu ditingkatkan lagi mengingat kondisi jalan yang ada belum sesuai dengan luas wilayah yang harus dilayani dimana rasio jalan terhadap luas wilayah sebesar 0.094 km/km^2 .

- c) Terbatasnya pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

Selain rasio jalan yang masih rendah, jenis permukaan jalan provinsi juga masih perlu peningkatan. Jalan tanah pada tahun 2011 masih sepanjang 246,46 km, sedang pada tahun 2008 sepanjang 338,16 km. Hal ini menunjukkan peningkatan yang belum signifikan, hanya sepanjang 91,7 km. Untuk jalan aspal pada tahun 2011 sepanjang 1.194 km, sedang pada 2008 sepanjang 1,260.71 km, hal ini juga menunjukkan bahwa biaya peningkatan dan pemeliharaan memang relatif belum memadai karena disatu sisi ada peningkatan kondisi jalan tanah menjadi jalan aspal/ kerikil dan disisi lain ada penurunan dari jalan aspal kondisi mantap menjadi jalan aspal kondisi tidak mantap. Dengan demikian secara umum harus ada peningkatan alokasi anggaran yang signifikan.

- d) *Percepatan pembangunan jalan baru;*

Dalam rangka pengembangan wilayah baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor riil, akan

dibangun beberapa ruas jalan baru, antara lain: Jalan 28 Oktober Pontianak-Mandor, Km 70 Trans Kalimantan (Kab. Sanggau)-Pal 20 Jalan Nasional (Kab. Landak), Jalan Sebangki-Mega Timur, Jalan Kamesuke (Sekadau-Melawi-Sukadana-Ketapang), Jalan Simpang Sebalo-Serimbu-Entikong, Jalan Serimbu-Bengkayang, Jalan Kedukul-Sekadau-Sintang, Jalan Perawas-Teluk Batang, jembatan Segarau-Mensere.

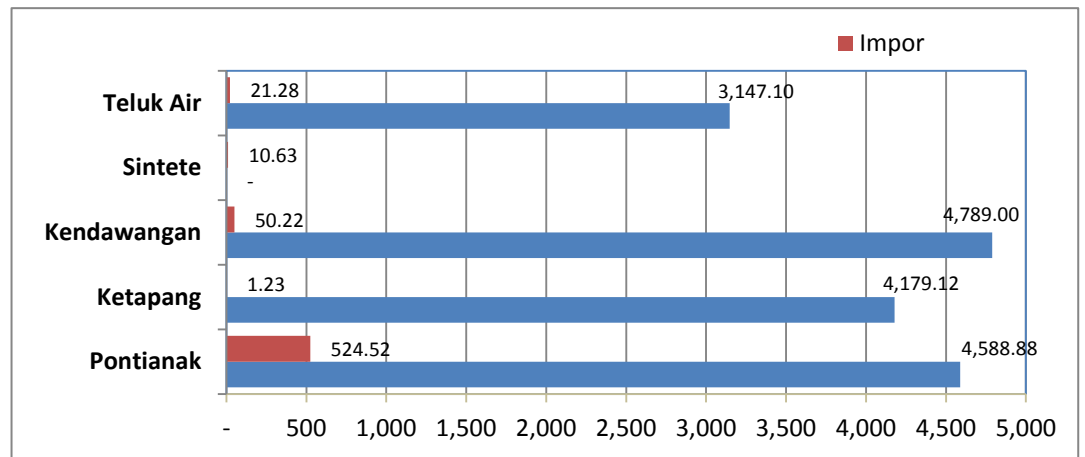
Dalam aspek pembangunan industri yang diarahkan pengembangannya melalui Kawasan Industri maka penyediaan jaringan jalan di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan kawasan industri itu sendiri.

Oleh karena itu 'peningkatan jaringan jalan' mencakup program-program prioritas rencana pembangunan jalan di Provinsi Kalimantan Barat yang utama yaitu:

1. Percepatan pembangunan Jalan Paralel Perbatasan dan Jalan Akses Perbatasan.
2. Percepatan Pembangunan Jalan Lingkar Luar dan Kanal Lingkar Luar.
3. Betterment Jalan-jalan Eksisting
4. Peningkatan status jalan dari status jalan Provinsi menjadi status jalan Nasional pada beberapa ruas jalan di Kalimantan Barat
5. Percepatan Pembangunan Jalan-jalan Baru

2) Pengembangan Pelabuhan

Ada 10 pelabuhan eksisting yang ada di Kalimantan Barat, yaitu 1 pelabuhan internasional (Pelabuhan Dwikora Pontianak), 6 pelabuhan nasional (Pelabuhan Merbau, Sintete, Singkawang, Teluk Air, Ketapang dan Kendawangan), serta 3 pelabuhan regional (Teluk Melano dan Karimata). Kegiatan ekspor impor dari dan ke Kalimantan Barat hanya dilakukan melalui 5 pelabuhan yaitu Pelabuhan Pontianak, Sintete, Teluk Air, Ketapang dan Kendawangan. Gambaran 'volume' ekspor impor pada masing-masing pelabuhan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2 Volume Ekspor dan Impor (Ribu Ton) Kalimantan Barat Berdasarkan Pelabuhan, 2015

Dari gambar ini nampak Pelabuhan Pontianak dan 3 pelabuhan lainnya memiliki kapasitas ekspor yang besar. Khusus untuk Pelabuhan Pontianak karena merupakan pelabuhan sungai, dengan volume ini Pelabuhan ini sudah mulai kesulitan melayani peningkatan ekspor dan impor, padahal pertumbuhan ekspor impor akan terus berlanjut. Perluasan pelabuhan ini tidak bisa dilakukan lagi, yang dimungkinkan hanyalah mempertahankan volume layanan dan peningkatan kualitas layanan. Disamping luasan yang terbatas, untuk mengatasi pendangkalan sungai dibutuhkan aktifitas pengerukan endapan sungai yang harus dilakukan setiap tahun, lebih dari 30 milyar Rupiah per tahun untuk pengerukan.

Oleh karena itu, dibutuhkan pelabuhan alternative untuk mengalihkan perkembangan aktifitas Pelabuhan Pontianak ini. Kegiatan ekspor dan impor yang sedemikian pesat membutuhkan pelabuhan dengan kapasitas yang memadai dan dapat dioperasikan setiap hari sepanjang tahun. Pendangkalan dan pasang surut permukaan air yang terjadi pada sungai menyebabkan kapasitas dan waktu operasional pelabuhan menjadi terbatas, dan pada akhirnya menghambat perkembangan kegiatan ekspor dan impor.

Dalam sasaran pembangunan industri yang sudah disusun (lihat Sub-bab 3.2), peningkatan ekspor diharapkan bisa tumbuh 6 persen per tahun. Oleh karena itu 'peningkatan pelabuhan' menjadi syarat mutlak untuk dilakukan mencakup

program-program prioritas rencana pembangunan pelabuhan di Provinsi Kalimantan Barat, yang utama adalah:

- a. *Pembangunan Pelabuhan Internasional KIjing Kec. Sei Kunyit* Kabupaten Mempawah (80 km dari Kota Pontianak), berada pada jalan Nasional, sebagai pelabuhan utama untuk mendukung perkembangan ekspor import, termasuk untuk pelayanan ekspor CPO langsung dari Kalimantan Barat.
- b. *Pembangunan Pelabuhan dan Terminal Khusus Tanjung Gondol*

3) Peningkatan Bandara Udara

Ada 6 bandara udara di Kalimantan Barat yang beroperasi saat ini. Bandara Supadio di Kabupaten Kubu Raya adalah bandara utama yang melayani penerbangan dari dan ke Kalimantan Barat. Bandara Supadio saat ini merupakan bandara internasional yang juga dikembangkan untuk kargo (IATA: PNK, ICAO: WIOO). Bandara Rahadi Usman di Ketapang, Bandara Sanggau Ledo, Bandara Susilo di Sintang, dan Bandara Pangsuma di Putussibau merupakan bandara udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier, dan bandara udara pengumpan ada di Kota Nanga Pinoh.

Kebutuhan layanan transportasi udara secara umum terus tumbuh. Peningkatan kapasitas Bandara Supadio sudah dianggap sangat mendesak, disamping pembangunan bandara lainnya. Luasnya wilayah Kalimantan Barat menyebabkan kebutuhan transportasi udara juga semakin dibutuhkan, maka peningkatan frekuensi penerbangan di Kalimantan Barat tumbuh hingga rata-rata diatas 7 persen per tahun.

Oleh karena itu 'peningkatan bandara udara' mencakup program-program prioritas rencana pembangunan bandara udara di Provinsi Kalimantan Barat yang utama yaitu:

1. *Pembangunan perluasan terminal penumpang Bandara Supadio dan pembangunan run-way baru sepanjang 3.500 meter*
2. *Penyelesaian pembangunan dan pemanfaatan Bandara Tebelian di Kabupaten Sintang; runway 2.400 m x 45 m.*
3. *Pembangunan Bandara Singkawang; runway 2.000 m x 45 meter*

4. Pembangunan Bandara Liku, di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.

4) Jaringan Kereta Api dan Pengembangan ASDP

RPJM Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan jaringan jalur kereta api diarahkan pengembangannya secara terpadu dengan kegiatan eksploitasi tambang, pengembangan kawasan industri, dan pengembangan kawasan pelabuhan, serta keselarasan dengan arahan pengembangan wilayah lain yang berbatasan dengan Kalimantan Barat (Sarawak dan Propinsi Kalimantan Tengah).

Jaringan Transportasi Sungai dan Penyeberangan yang diarahkan untuk dikembangkan dalam masa rencana adalah penyeberangan:

- a) Manismata (Kabupaten Ketapang) — Sukamara (Provinsi Kalimantan Tengah).
- b) Rasau Jaya — Kubu — Batuampar — Telok Batang — Teluk Melano.
- c) Sungai Sumpik — Ceremai.
- d) Teluk Kalong — Tanjung Harapan.

Rencana pengembangan jaringan kereta api ini masih dalam kajian FS, sedangkan ASDP diprioritaskan diarahkan untuk dikembangkan adalah di Semparuk (pelabuhan penyeberangan).

Berikut ini diantara program-program prioritas pengembangan aspek transportasi di Kalimantan Barat yang telah diuraikan di atas yang berhubungan dengan pembangunan sektor industri.

Tabel 4.26 Prioritas Program Pembangunan Transportasi Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
1	Peningkatan Jaringan Jalan			
a.	Penyelesaian Pembangunan Jembatan Tayan	√		
b.	Betterment Jalan-jalan Eksisting	√	√	√
c.	Percepatan Pembangunan Jalan-jalan Baru (Khususnya yang menghubungkan lokasi industri dengan sumber-sumber produksi bahan baku industri)			

No	Program	Tahun		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
d.	Lanjutan Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Perkereta-Apian	√	√	√
2	Peningkatan Pelabuhan			
a.	Pembangunan Pelabuhan Internasional Sei Kunyit	√		
b.	Pembangunan Pelabuhan dan Terminal Khusus Tanjung Gondol	√		
3	Peningkatan Airport			
a.	Peningkatan kapasitas Bandara Supadio	√		
b.	Penyelesaian Pembangunan dan pemanfaatan Bandara Tebelian di Kabupaten Sintang	√		
c.	Pembangunan Bandara Singkawang	√	√	

5) Sistem Informasi Industri

Dengan semakin berkembangnya industri di Kalimantan Barat, dibutuhkan dukungan yang kuat akan adanya arus informasi industri yang dapat memberikan arahan yang tepat dan akurat bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha industrinya. Sebuah sistem informasi industri yang mudah diakses, sesuai kebutuhan industri dan ter-update informasinya sangat strategis dibangun. Sistem informasi ini jika akurat akan menjadi stimulus pengembangan industri di Kalimantan Barat.

Tabel 4.27 Program Pembangunan Sistem Informasi Industri Kalimantan Barat Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
1	Pembangunan Sistem Informasi Industri	√		
2	Layanan Informasi Industri dan Updating	√	√	√

6) Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Daya saing produk industri saat ini dan kedepan sangat dipengaruhi oleh kualitas produksi dan konsistensinya. Untuk menjaga konsistensi ini maka diperlukan pengembangan standarisasi industri yang mampu memenuhi tuntutan terjaganya kualitas produk secara konsisten.

Tabel 4.28 Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri Kalimantan Barat Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
1	Pembangunan Balai Besar termasuk didalamnya Laboratorium Produk Hasil Industri		√	√
2	Penentuan standarisasi industri dan kerjasama penerapan standarisasi industri	√		

5. Pemberdayaan Industri

Pembangunan industri daerah harus mewujudkan pengembangan IKM daerah. Maka harus ada program-program pemberdayaan yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya IKM dimaksud.

Tabel 4.29 Program Pemberdayaan IKM Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun		
		2017-2022	2022-2027	2027-2037
1	Pendataan IKM (updating)	√		
2	Pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	√	√	√
3	Fasilitasi alat tepat guna (<u>lihat</u> program pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri)	√		
4	Bimbingan dan pengawasan	√	√	√
5	Pengembangan <i>linkage</i> dengan IBS (kerjasama produksi; IKM menjadi pemasok IBS)	√	√	√

V. PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Barat Tahun 2017-2037 ini merupakan penjabaran lebih detail dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIP ini menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat. RPIP ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS